



# RENSTRA

## Rencana Strategis 2021-2026



# DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALU



 dishubpalu

 Dinas Perhubungan Kota Palu

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran ALLAH SWT, karena rahmat, karunia serta taufik dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Palu Tahun 2021-2026. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Palu disusun melalui berbagai tahapan, yaitu interaksi dengan para pemangku kepentingan terkait baik di pusat dan daerah, partisipasi seluruh pejabat Dinas Perhubungan Kota Palu, serta dengan memperhatikan arah reformasi perencanaan dan penganggaran yang telah ditentukan. Renstra ini juga disusun dengan semangat untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan sebagai landasan bagi Pemerintah Kota Palu dalam menentukan arah pembangunan bidang Perhubungan ke depan.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Palu Tahun 2021-2026 ini berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Palu yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2021-2026, guna mendukung pencapaian Visi Kota Palu yaitu “Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman, dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan “.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA PALU**

**MOHAMAD ARIF, S.STP, M.Si**  
NIP. 19780818 199612 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>DAFTAR TABEL</b>	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	v
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	10
1.3. Maksud dan Tujuan	15
1.4. Sistematika Penyusunan	16
<b>BAB II     GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALU</b>	18
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Palu	18
2.1.1 Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Palu	18
2.1.2 Tugas Fungsi Dinas Perhubungan	19
2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Palu	24
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Palu	28
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Palu	35
<b>BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALU</b>	39
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Palu	39
3.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Wali Kota Palu dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2021 - 2026	41
3.3 Telahaan Renstra Kementerian Perhubungan RI dan Dinas Perhubungan Propinsi Sulawesi Tengah	51
3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	58
3.4.1 Rencana Jaringan Jalan	58
3.4.2 Terminal	102
3.4.3 Rencana Jaringan Kereta Api	102

	3.4.4 Sistem Jaringan Penyeberangan	102
	3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	103
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>	104
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kota Palu	104
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	108
	5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Palu	108
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	110
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALU</b>	122
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b>	126

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah SDM Dinas Perhubungan Kota Palu	24
Tabel 2.2	Keadaan Pegawai Menurut Pendidikan	24
Tabel 2.3	Keadaan Pegawai Menurut Golongan	25
Tabel 2.4	Komposisi Pegawai Menurut Jabatan	25
Tabel 2.5	Keadaan Pegawai Menurut Kompetensi/Keahlian	26
Tabel 2.6	Aset Bangunan Gedung	27
Tabel 2.7	Aset Mesin dan Perlengkapan Kantor	28
Tabel 2.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Palu	30
Tabel 2.9	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Palu	32
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Palu	39
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Palu Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	46
Tabel 3.3	Rencana Jaringan Jalan Kota Fungsi Jalan Arteri Sekunder Kota Palu	59
Tabel 3.4	Rencana Jaringan Jalan Kota Fungsi Jalan Kolektor Sekunder Kota Palu	60
Tabel 3.5	Rencana Jaringan Jalan Kota Fungsi Jalan Lokal Sekunder Kota Palu	63
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kota Palu	106
Tabel 5.1	Strategi dan Arah Kebijakan	108
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kota Palu	111
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Kunci Dinas Perhubungan Kota Palu yang Mengacu pada RPJMD Kota Palu 2021-2026	106

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1	Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Palu	8
Gambar 1.2	Keterkaitan antara Dokumen RPJMD dan Renstra Dinas Perhubungan Kota Palu	9
Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Palu	23

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan serta 38. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah di ubah dengan peraturan wali kota palu nomor 6 tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat, maka Dinas Perhubungan Kota Palu mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah di Bidang Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait kebijakan teknis operasional, maka Dinas Perhubungan Kota Palu merumuskan kebijakan teknis operasional di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Prasarana, Bidang pengembangan dan Keselamatan serta Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor. Berdasarkan Tugas dan Fungsi tersebut perlu disusun

dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Palu dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal.

Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen rencana pembangunan daerah yang disusun. Untuk itu, dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Palu perlu dikumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggung jawabkan. Adapun data dan informasi yang harus disiapkan antara lain :

1. Peraturan perundang-undangan yang terkait;
2. Kebijakan pemerintah yang terkait;
3. RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021;
4. RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026;
5. Rencana Strategi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Tahun 2021-2024;
6. Rencana Strategi Dinas Perhubungan Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021;
7. Hasil evaluasi Rencana Strategi Dinas Perhubungan Kota Palu periode lalu.

Renstra Dinas Perhubungan Kota Palu setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Palu yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palu.

#### 1.1.1. Pengertian Renstra

Renstra adalah singkatan dari Rencana Strategis, yang terdiri dari Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan, Indikator serta Pendanaan, yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu (5 tahun) sehubungan dengan tugas dan fungsi (Tusi) Instansi yang disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategik.

#### 1.1.2. Fungsi Renstra

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Palu Tahun 2021-2026 ini, berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan stakeholders yang ada.

#### 1.1.3. Proses Penyusunan Renstra

Proses penyusunan Rencana Strategis ini telah melalui beberapa tahapan mulai Pembentukan tim Penyusun renstra Dinas Perhubungan Kota Palu, dilanjutkan dengan orientasi mengenai Renstra, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Tim penyusun diangkat dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu.

Setelah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai implementasi teknis Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka proses dan mekanisme penyusunan

Renstra Dinas Perhubungan Kota Palu 2022-2026 mengacu pada garis kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai Visi dan Misi Walikota.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Palu sebagai dokumen perencanaan pembangunan merupakan dokumen perencanaan yang berlaku 5 (lima) tahun dan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Palu serta berpedoman kepada RPJMD Kota Palu 2021-2026 dan bersifat indikatif. Perumusan Renstra Dinas Perhubungan Kota Palu 2021-2026, merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan akhir RPJMD Kota Palu tahun 2021-2026. Oleh karena itu, penyelarasan dan konsolidasi data dan informasi strategis yang dimuat didalam renstra ini sejalan dengan dokumen RPJMD Kota Palu 2021-2026.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Palu sebagaimana yang ditekankan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mensyaratkan adanya indikator kinerja yang terukur sebagai basis penyusunan Rencana Program/Kegiatan dan pagu pendanaan indikatif. Dengan demikian program, kegiatan dan anggaran setiap tahun selama 5 (lima) tahun berdasarkan indikator utama. Hal ini mengacu kepada sasaran-sasaran strategis pembangunan selama 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari tujuan atau grand strategi pembangunan Pemerintah Daerah Kota Palu.

Asistensi Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Palu merupakan kegiatan sistematis dan memfokuskan pada pengintegrasian antara *grand* strategi/tujuan pembangunan

sebagai penjabaran sasaran strategis dan indikator-indikator kinerja pembangunan yang mengukur tingkat pencapaian sasaran. Kemudian menterjemahkan indikator-indikator kinerja ke dalam target-target pembangunan yang harus dicapai melalui program dan kegiatan dengan pendanaan berbasis kinerja dan lokasi kegiatan yang jelas. Tahapan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Palu dimulai dari persiapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Perhubungan Kota Palu, penyusunan rancangan Renstra, penyusunan rancangan akhir Renstra dan Penetapan Renstra Dinas Perhubungan Kota Palu.

a. **Persiapan Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Perhubungan Kota Palu**

Kegiatan awal ini meliputi beberapa sub kegiatan yang sangat menentukan kualitas Renstra Dinas Perhubungan Kota Palu yang akan dihasilkan, antara lain :

1) **Pembentukan Tim Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Palu**

Tim penyusun diangkat dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu. Tim penyusun yang terdiri dari pejabat dan staf Dinas Perhubungan Kota Palu bersangkutan yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran.

2) **Orientasi Mengenai Renstra**

Kegiatan ini dimaksudkan agar seluruh anggota tim penyusun mempunyai persamaan persepsi dan memahami berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan teknis penyusunan dokumen Renstra

Dinas Perhubungan Kota Palu, menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra Dinas Perhubungan Kota Palu.

3) Pengumpulan Data dan Informasi

Sebuah perencanaan yang baik harus berangkat dari data dan informasi yang akurat. Oleh karena itu data dan informasi yang benar maka perencanaan yang akan dihasilkan pun akan sesuai dengan yang diharapkan. Dokumen yang diperlukan antara lain peraturan perundang-undangan yang terkait; kebijakan pemerintah terkait; Rancangan awal RPJMD Kota Palu 2021-2026 dan RPJMD provinsi Sulawesi Tengah; Renstra Kementerian/Lembaga terkait,; Renstra Dinas Perhubungan Kota Palu terkait di Tingkat Provinsi; Perda pembentukan Organisasi dan pelaksanaan tupoksi serta struktur organisasi; hasil evaluasi Renstra periode sebelumnya; perkembangan pengelolaan keuangan dan asset 5 tahun terakhir, Indikator Kinerja Kunci Pelayanan (IKK) serta data statistik yang diperlukan selama 5 (lima) tahun terakhir. Serta data dukung lainnya yang dianggap perlu di masukkan ke dalam dokumen perencanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Palu.

b. Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Perhubungan Kota Palu

Penyusunan rancangan Renstra Dinas Perhubungan terdiri dari 2 tahapan, yaitu perumusan dan penyajian.

1) Tahap Perumusan Rancangan Renstra

Perumusan rancangan Renstra Dinas Perhubungan 2021-2026 dilakukan sesudah Kepala Dinas menerima Surat Edaran Walikota tentang Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah. Rancangan Renstra Dinas Perhubungan Kota Palu disusun berdasarkan mempertimbangkan koordinasi kebutuhan daerah dan usulan bidang-bidang. Hal ini berguna untuk mengidentifikasi pembagian tugas dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Palu 2021-2026.

2) Penyajian rancangan akhir Renstra Dinas Perhubungan Kota Palu

Rancangan akhir Renstra Dinas Perhubungan disajikan dengan sistematika sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017. Rancangan akhir Renstra tersebut diverifikasi dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara Tujuan, Strategi, dan Kebijakan sesuai dengan Program dan Kegiatan yang ada pada Dinas Perhubungan dengan RPJMD Kota Palu. Pada akhirnya rancangan akhir Renstra Dinas Perhubungan disahkan dengan Keputusan Walikota, maka Renstra Dinas Perhubungan Kota Palu 2021-2026 menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan. Adapun tahapan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Palu 2022-2026 dapat dijelaskan sebagaimana dalam gambar berikut :



**Gambar 1.1**

Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Palu

1.1.4. Keterkaitan Renstra Dinas Perhubungan Kota Palu dengan RPJMD, Renstra Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah

Renstra Dinas Perhubungan Kota Palu 2021–2026 akan menjabarkan secara komprehensif yang memuat tujuan, sasaran dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dimana telah ditetapkannya prioritas daerah sebagai acuan didalam menyusun program dan kegiatan yang sejalan dengan RPJMD. Adapun 4 (empat) Misi Kota Palu 2021-2026, yaitu :

1. Membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global;
2. Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana;
3. Mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan covid-19;



Untuk mencapai tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Palu, maka perlu menselaraskan isu-isu strategis dalam seluruh dokumen perencanaan baik dalam dokumen Renstra Kementerian, Renstra Propinsi maupun isu – isu strategis yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kota Palu. Hal ini dilakukan dalam rangka upaya menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Renstra Dinas Perhubungan Kota Palu Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor.9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019.
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024;

19. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor. PM 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor. PM 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor. PM 49 Tahun 2014 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
22. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 40 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
23. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor. PM 96 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
24. Peraturan menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor. PM 132 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Perangkat Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

- Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  30. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025;
  31. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 02 tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum;
  32. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah di ubah dengan peraturan daerah no 8 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  33. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 04 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026;
  34. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 02 tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041;
  35. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Trayek;
  36. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Izin Usaha Angkutan Penumpang, Izin Usaha Angkutan Barang, Izin Usaha Angkutan Sewa;

37. Peraturan Wali Kota Palu Nomor. 08 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
38. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah di ubah dengan peraturan wali kota palu nomor 6 tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
39. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas perhubungan Kota Palu sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Wali Kota no 9 Tahun 2020 tentang Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas perhubungan Kota Palu;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Palu Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk :

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2021-2026 dapat tercapai.
- b. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
- c. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan.
- d. Menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Palu Tahun 2021-2026 bertujuan sebagai berikut

1. Secara Substansial : Sebagai arah kebijakan Perangkat Daerah dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Palu;
2. Secara Normatif : Menjadi dasar penyusunan Renja tahunan Perangkat Daerah;
3. Secara Operasional : Menjadi arahan untuk peningkatan kinerja pemerintah pada urusan Perhubungan
4. Secara Faktual : Menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja Perangkat Daerah.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Landasan Hukum
	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penyusunan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALU
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Palu
	2.1.1 Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan
	2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Palu
	2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Palu
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALU

	3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Palu
	3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota Palu dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2016 - 2021
	3.3	Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan RI dan Dinas Perhubungan Propinsi Sulawesi Tengah
	3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV		TUJUAN DAN SASARAN
	4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kota Palu
BAB V		STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI		RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII		KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALU
BAB VIII		PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALU**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Perhubungan Kota Palu**

##### 2.1.1. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Palu

Tugas Fungsi dan Susunan Organisasi pada Dinas Perhubungan Kota Palu didasarkan, sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
2. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah di ubah dengan peraturan daerah no 8 tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
3. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagiama telah di ubah dengan peraturan wali kota palu nomor 6 tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
4. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas perhubungan Kota Palu sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Wali Kota no 9 Tahun 2020 tentang Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas perhubungan Kota Palu.

Dinas Perhubungan Kota Palu mempunyai tugas yaitu membantu Wali Kota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas di atas, maka Dinas Perhubungan Kota Palu dalam menyelenggarakan fungsinya, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan urusan perhubungan.
2. Pelaksanaan kebijakan urusan perhubungan.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perhubungan.

4. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### 2.1.2. Tugas Fungsi Dinas Perhubungan

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris dan bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Adapun tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

##### 1. Sekretaris Dinas

Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud di atas, maka Sekretaris Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan pengoordinasian rumusan perencanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan.
- b. Penyusunan laporan kinerja.
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian.
- d. Pengelola urusan tata usaha dan rumah tangga;
- e. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- f. Pengelolaan perlengkapan dan aset;
- g. Pengelolaan administrasi keuangan;
- h. Pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas fungsinya.

##### 2. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan. Bidang Lalu Lintas

dan Angkutan dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

- a. Perumusan dan penyusunan rencana kegiatan dibidang Lalu Lintas dan angkutan.
- b. Pemberian petunjuk teknis dibidang Lalu Lintas dan angkutan.
- c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang Lalu Lintas dan angkutan.
- d. Pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan serta pengembangan di bidang Lalu Lintas dan angkutan jalan.
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Lalu Lintas dan angkutan.
- f. Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang Lalu Lintas dan angkutan jalan.
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- h. Penjatuhan hukuman disiplin terhadap aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
- i. Menyelenggarakan tugas lainyang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

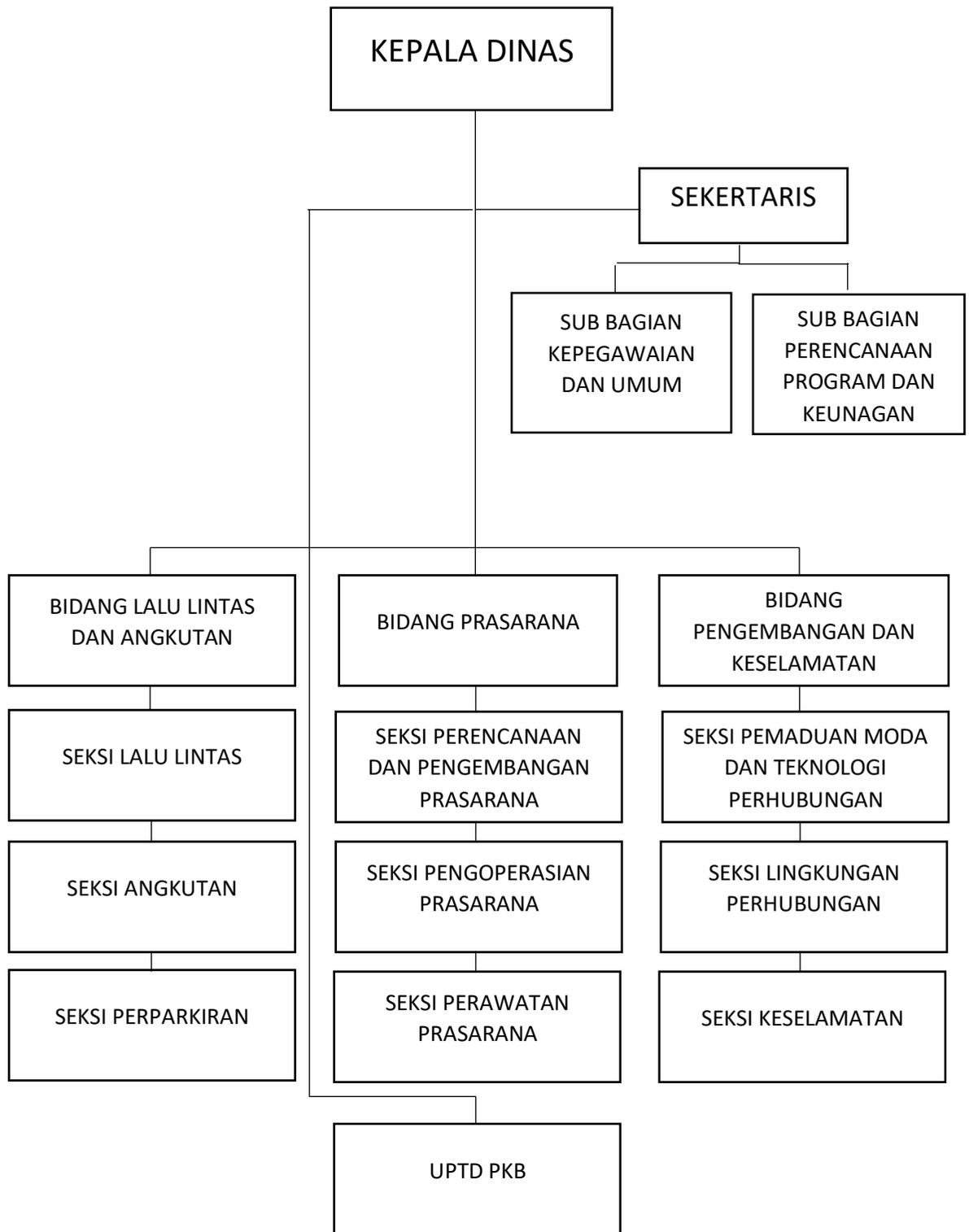
### 3. Bidang Prasarana

Bidang Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas merumuskan, menyusun, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana. Bidang Prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada di atas menyelenggarakan fungsi, sebgai berikut :

- a. Perumusan dan penyusunan rencana kegiatan dibidang prasarana Lalu Lintas.

- b. Pemberian petunjuk teknis dibidang prasarana Lalu Lintas.
  - c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang prasarana Lalu Lintas.
  - d. Pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan dibidang prasarana Lalu Lintas.
  - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang prasarana Lalu Lintas.
  - f. Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana Lalu Lintas.
  - g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
  - h. Penjatuhan hukuman disiplin terhadap aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - i. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Pengembangan dan Keselamatan
- Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengembangan dan keselamatan. Bidang Pengembangan dan Keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. Perumusan dan penyusunan rencana kegiatan dibidang pengembangan dan keselamatan perhubungan.
  - b. Pemberian petunjuk teknis dibidang pengembangan dan keselamatan perhubungan.
  - c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pengembangan dan keselamatan perhubungan.

- d. Pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan dibidang pengembangan dan keselamatan perhubungan.
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengembangan dan keselamatan perhubungan.
- f. Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan keselamatan perhubungan.
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- h. Penjatuhan hukuman disiplin terhadap aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- i. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Sumber: Peraturan Wali Kota Palu Nomor 09 Tahun 2020

**Gambar 2.1.**  
Stuktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Palu

## 2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Palu

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kota Palu didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang disajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.1.**  
Jumlah SDM Dinas Perhubungan Kota Palu

Pegawai	POSISI	POSISI
	Per 31-12-2020	Per 20-04-2021
Pejabat Struktural	17	17
Pejabat Fungsional	2	2
Pegawai (Staf)	80	71
Tenaga Kontrak	206	203
<b>Jumlah</b>	<b>305</b>	<b>293</b>

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Palu 2021

Komposisi Pegawai menurut pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.2.**  
Keadaan Pegawai Menurut Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH		KET
		2020	2021	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Strata Dua	6	6	
2	Strata Satu	32	29	
3	Diploma Empat	5	9	
4	Diploma Tiga	8	7	
5	Diploma Dua	1	2	
6	Sarjana Muda	0	0	
7	S L T A	47	37	
<b>JUMLAH</b>		<b>99</b>	<b>90</b>	

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Palu 2021

Komposisi Pegawai menurut golongan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.3**  
Keadaan Pegawai Menurut Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH		KET
		2020	2021	
1	2	3	4	5
1	I	0	0	
2	II	47	40	
3	III	46	44	
4	IV	6	6	
<b>JUMLAH</b>		<b>99</b>	<b>90</b>	

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Palu 2021

Komposisi Pegawai menurut jabatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.4.**  
Komposisi Pegawai Menurut Jabatan

No	Jabatan/ Tugas	Jumlah (org)	PNS	Honor/	Ket
				Kontrak	
1	Kepala Dinas	1	1	-	
2	Sekretaris	1	1	-	
3	Kepala Bidang	3	3	-	
4	Kasi, Kasubag, Ka. UPTD	12	12	-	
5	Staf :				
	Sekretariat&Bidang	58	30	28	
	Satuan Tugas Lalu Lintas&Perparkiran	128	20	108	
	UPTD PKB	12	8	4	
	ASDP	0	0	0	
	Terminal (Tipo, Bulili, dan Manonda)	73	15	58	
6	Sopir Bus	5	0	5	
<b>Jumlah</b>		<b>293</b>	<b>90</b>	<b>203</b>	

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palu 2021

Komposisi Pegawai menurut kompetensi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.5.**  
Keadaan Pegawai Menurut Kompetensi/Keahlian

No.	KOMPETENSI/KEAHLIAN	Jumlah	Tersedia	Jabatan
		Kebutuhan (org)	Tahun 2021	
1	Teknik LLAJ :			
	D-IV/S1/S2 Transportasi	1	9	
	D-III LLAJ	11	2	
	D-III ASDP	0	0	
	D-III PERKERETAAPIAN	2	3	
	D-II PKB	2	2	
	Penguji strata II	0	0	
	Penguji Strata III	0	0	
	Penyelia/ Master	0	0	
2	Teknik Sipil :			
	S1 /s2Teknik Sipil	1	1	
	S1 Teknik Elektro	0	0	
	D III Teknik Elektro	0	0	
	D-III Teknik Mesin	2	0	
	D-III teknik sipil	0	0	
	D-III Listrik	0	1	
	D-III Teknik Perencanaan wil kota	1	0	
3	Ilmu Pemerintahan :			
	S1/S2	0	0	
4	Ilmu Admistrasi/Akuntansi/Ekonomi:			
	S1/S2 Adminstrasi	0	28	
	S1/S2 Akuntansi	2	1	
	D-III Adm Perkantoran	0	0	
	D-III Administrasi Negara	7	0	
	D-III Manajemen	1	0	
	D-III akuntansi	0	0	
5	Ilmu Hukum :			
	S1/S2 hukum	0	4	
	S1/S2 hukum pidana	3	0	
	D-III Ppap Ketatalaksanaan	0	1	
6	Ilmu IT/tekonologi :			
	S1/S2 IT/ Desain Grafis	0	0	
	D-III Manajemen Informatika	1	0	
	D-III Teknik Informatika	1	0	
	D-III Desain Grafis	0	0	
	D-II/III Komputer	0	0	
7	SMA/SMK	74	38	
<b>Jumlah</b>		<b>109</b>	<b>90</b>	

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palu 2021

Sumber daya asset/modal dalam bentuk bangunan gedung yang terdapat di Dinas Perhubungan Kota Palu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.6**  
Aset Bangunan Gedung

No.	Nama Asset	Jumlah	Tahun	Kondisi
		(Unit/ Lokasi)	Pengadaan	
1	Gedung Kantor:			
	Kantor Dinas	1	2016	Rusak Berat
	Gedung ATCS	1	2014	Rusak Rinean
	Gedung Pengujian	1	2016	Rusak Berat
	Tempat Parkir bus	1	2016	Rusak
	Gudang	1	2016	Rusak Berat
2	Gedung Terminal:			
	T. Tipo ( Type B)	1	1996	Baik
	T. Manonda ( Type C)	1	1996	Baik
	T. Bulili ( Type C)	1	1996	Baik
3	Pos Pengendalian:			
	Pos Kantor Dinas	1	1996	rusak
	Pos Pengendalian	5	1996 - 1997	rusak
4	Kendaraan:			
	K. Roda 4 Ops. Pejabat	5	2012 - 2015	Baik
	K. Roda 4 Ops Lap.	4	2004 - 2018	Baik
	Bus	9	2016	Baik
	Spd Mtr Ops Pejabat	11	2005 - 2016	Baik
	Spd Mtr Ops Lap.	20	2000 - 2016	18 Baik/2
	Mobil Derek/Mekanik	1	2014	Baik
5	Fasilitas Perlengkapan Jalan:			
	Traffic Light	29	2008 - 2016	Baik
	Warning Light	6	2015 - 2016	Baik/3 hilang bencana
	Rambu	1443	2011 - 2018	Baik
	Marka	35.530 m	2011 - 2016	Baik
	LPJU	-	-	-
6	Tanah Kosong	3	1997	Baik

Sumber: Dinas Perhubungan 2021

Sumber daya asset/modal dalam bentuk asset mesin dan perlengkapan kantoryang terdapat di Dinas Perhubungan Kota Palu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.7**  
Aset Mesin dan perlengkapan Kantor

No.	Nama Asset	Jumlah	Tahun	Kondisi
		(Unit)		
1	Peralatan Pengujian:			
	Break Tester	1	2014	Baik
	Exel Load	1	2017	Baik
	Uji Emisi	1	2015	Baik
	Sound Level	2	2017	Baik
	Uji Lampu	1	2014	Baik
	Spedo Meter	-	-	-
2	Peralatan Komputer:			
	Komputer PC	20	2011 -2020	18 Baik / 2 Kurang
	Laptop	8	2011 - 2019	Baik
	Printer	25	2013-2020	baik
	Scanner	-	-	-
	In focus	2	2015 - 2016	Baik
3	Peralatan mesin lain:			
	Sound sistem	-	-	-
	AC	20	2004 -2017	6 Baik/14 Rusak

Sumber : Dinas Perhubungan 2021

### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Palu

Tingkat Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan dapat dilihat dari target Renstra Tahun 2016-2021. Dinas Perhubungan mendukung program prioritas pada misi ke lima yang berbunyi “Penataan dan pengembangan Infrastruktur Kota berbasis wisata budaya”. Untuk mewujudkan program tersebut, maka perlu penjabaran program melalui RPJMD dan Renstra. Dari penjabaran program tersebut dapat diketahui mengenai tingkat capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Palu tahun 2016-2021. Pada rentang waktu tahun 2016-2021 terdapat sinkronisasi terhadap program dan kegiatan yang termuat dalam dokumen perencanaan baik RPJMD Kota Palu maupun Renstra Dinas Perhubungan Kota Palu. Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam pencapaian kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan pada tahun 2016-2021 yaitu bencana alam gempa bumi, tsunami serta likuifaksi yang melanda Wilayah Kota Palu, Sigi dan Donggala yang menyebabkan rusaknya sarana dan prasarana serta aset Dinas

Perhubungan Kota Palu dalam rangka melakukan pelayanan terkait tugas pokok yang di miliki oleh Dinas Perhubungan Kota Palu, kemudian bencana non bencana alam *covid-19* yang melanda hampir seluruh negara di dunia termasuk wilayah Indonesia dan wilayah Kota Palu khususnya yang berdampak pada menurunnya kinerja pelayanan yang ada di Dinas Perhubungan Kota Palu. Yang terakhir adalah keterbatasan kewenangan yang di miliki oleh Dinas Perhubungan Kota Palu dalam upaya meningkatkan pelayanan yang ada di Kota Palu. Namun demikian secara umum Dinas Perhubungan Kota Palu telah memaksimalkan upaya dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dengan memaksimalkan program-program yang termuat dalam dokumen perencanaan.

Adapun Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Palu yang mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilihat Tabel 2.8 sebagai berikut:

**Tabel 2.8**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Palu**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Palu	Target IKK	Target Renstra Dinas Perhubungan Kota Palu Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18	18
1	Jumlah penumpang angkutan darat melalui terminal	165.372	136.055	142.857	149.999	157.498	165.372	0	-	935.334	633.398	222572	81.574	67.183	0,00	6,55	4,22	1,41	0,49	0,00
2	Jumlah trayek angkutan umum	86%	0	43%	43%	71%	86%	100%	0	43%	43%	43%	43%	43%	0,00	1,00	1,00	0,61	0,50	0,43
3	Jumlah uji kir angkutan umum	2583	2423	2230	2342	2460	2583	0	0	417	220	70	75	0	0,00	0,19	0,09	0,03	0,03	0,00
4	Persentase layanan angkutan darat	19,14	16,39	17,04	17,71	18,42	19,14	6	0	15,78	18,51	10,37	16,95	6	0,00	0,93	1,05	0,56	0,89	1,00
5	Persentase Pemenuhan Uji Kendaraan ( KIR)	61	57	53	55	58	61	0	0	0,099	0,052	0,016	0,017	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pemasangan rambu-rambu	91	50	52	63	81	91	30	0	13,76	25,24	21,66	21,75	130	0,00	0,26	0,40	0,27	0,24	4,33
7	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	3,7	2,78	2,78	3,06	3,36	3,7	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017 dan P-Kedua Renstra Dishub 2016- 2021

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017 dan P-Kedua Renstra Dishub 2016- 2021

Tabel di atas mengemukakan adanya kesenjangan/gap pelayanan pada kinerja yang ada di Dinas Perhubungan Kota Palu selama periode 2016-2021 sebagaimana telah di uraikan sebelumnya.

Berikut Tabel 2.9 mengenai anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Palu Tahun 2016-2020, sebagai berikut:

**Tabel 2.9**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Palu**

Unitas	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program/Kegiatan :																	
1																	
Pelayanan administratif perkantoran :																	
Penyediaan jasa surat menyurat	52.014.000	0	0	0	0	52.014.000	0	0	0	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25	0
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	177.900.000	326.400.000	373.488.500	103.674.952	109.381.917	177.714.955	287.280.083	292.033.325	88.957.001	74.311.984	1,00	0,88	0,78	0,84	0,88	8	-53
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas dan operasional	581.802.400	985.581.250	573.898.500	112.550.000	105.100.000	517.893.750	603.812.150	450.956.545	98.398.374	48.511.900	0,92	0,81	0,79	0,88	0,44	-13	-124
Penyediaan jasa administratif keuangan	1.419.872.000	1.482.227.400	2.333.322.200	2.243.868.000	2.094.393.538	1.403.401.500	1.457.377.400	2.281.935.998	2.184.118.000	2.088.110.474	0,99	1,00	0,97	0,98	1,00	13	8
Penyediaan jasa kebersihan kantor	0	15.285.450	32.245.000	31.102.000	31.225.183	0	15.285.450	28.245.000	28.102.000	28.980.000	0,00	1,00	0,88	0,94	0,93	27	37
Penyediaan alat tulis kantor	88.878.901	98.528.015	109.908.100	84.050.200	83.198.200	88.843.500	98.253.015	109.803.100	84.050.200	83.191.400	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9	3
Penyediaan barang cetakan dan pengoperasian	18.227.000	88.372.400	29.805.000	20.488.000	9.485.400	18.227.000	71.427.400	25.484.500	13.320.000	8.915.400	1,00	0,81	0,85	0,85	0,73	73	-72
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.737.500	7.925.000	20.000.000	12.100.000	1.400.000	1.737.500	7.925.000	18.472.500	4.218.000	1.400.000	1,00	1,00	0,92	0,35	1,00	95	-101
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	133.938.100	291.162.400	98.587.000	114.037.800	181.931.474	133.934.100	282.437.400	88.490.000	88.870.000	155.098.474	1,00	0,97	0,71	0,78	0,98	28	-49
Penyediaan bahan bakar dan pendirian perantara/undangan	0	23.240.000	18.550.000	18.550.000	5.840.000	0	17.800.000	11.820.000	18.400.000	5.840.000	0,00	0,77	0,71	0,99	1,00	-23	-26
Penyediaan makanan dan minuman	27.808.000	32.801.000	48.112.500	14.958.000	4.587.500	27.808.000	32.885.500	20.880.500	14.958.000	4.122.500	1,00	1,00	0,45	1,00	0,90	-20	-86
Napel-napel koordinasi dan koordinasi ke luar daerah	915.912.000	302.800.000	294.800.000	294.800.000	125.205.508	915.800.002	302.781.949	285.151.480	285.815.771	120.343.800	1,00	1,00	0,90	0,97	0,98	-32	-87

6	Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan																0	0
	Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan	0	29.555.000	0	0	0	0	28.494.000	0	0	0	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	-25	25
	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	74.211.400	0	50.740.000	0	0	74.139.400	0	49.872.000	0	0	1,00	0,00	0,98	0,00	0,00	-50	25
	Peningkatan pengelolaan angkutan sungai, danau dan penyeberangan	138.798.000	19.241.500	54.768.200	86.556.000	32.027.500	135.508.800	19.241.500	51.298.800	82.570.000	32.027.500	0,98	1,00	0,94	0,95	1,00	23	-165
	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	147.627.240	123.935.000	182.736.250	155.944.000	81.745.000	147.606.440	117.772.000	151.106.250	155.944.000	77.545.000	1,00	0,95	0,83	1,00	0,95	-8	-25
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	61.030.100	0	0	0	0	61.030.100	0	0	0	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25	0
	Peningkatan pengelolaan perparkiran	455.252.600	835.095.000	470.770.000	1.466.907.500	440.205.000	454.541.600	822.368.500	439.560.000	628.367.248	258.833.031	1,00	0,98	0,93	0,43	0,59	45	-39
	Penertiban pemenuhan standar keselamatan fasilitas dan prasarana perhubungan	0	0	38.610.000	0	0	0	0	3.610.000	0	0	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	-25	25
	Penertiban pemenuhan ketentuan andalalin	0	0	0	187.387.500	15.765.000	0	0	0	186.009.500	15.155.000	0,00	0,00	0,00	0,99	0,96	-23	-257

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program/Kegiatan :																	
7 Pengembangan komunikasi, informasi & media massa																	
Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	227.643.000	0	0	0	0	176.603.000	0	0	0	0	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-25	0
Pengawasan dan pembinaan jaringan komunikasi dan informasi	15.424.000	0	0	0	0	14.590.000	0	0	0	0	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-25	0
Pengawasan dan pembinaan pos dan telekomunikasi	79.650.000	0	0	0	0	76.727.300	0	0	0	0	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-25	0
9 Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ																0	0
Rehabilitasi/pemeliharaan alat pemberi isyarat lalu lintas	280.729.119	137.600.000	392.573.099	145.559.800	74.585.000	280.680.000	137.410.000	220.585.000	145.559.800	73.653.000	1,00	1,00	0,56	1,00	0,99	6	-54
10 Peningkatan pelayanan angkutan																0	0
Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	202.608.450	901.054.700	858.926.400	186.732.500	12.060.000	198.195.950	882.008.300	687.127.650	130.710.060	6.987.600	0,98	0,98	0,80	0,70	0,58	42	-537
Pengendalian disiplin pengoprasian angkutan umum dijalan raya	169.953.800	718.605.000	1.523.311.500	1.255.126.000	686.473.800	169.953.800	703.918.000	1.396.990.500	1.239.943.600	670.224.500	1,00	0,98	0,92	0,99	0,98	93	7
Fasilitas perizinan dibidang perhubungan	149.585.000	129.688.000	552.803.000	140.379.500	298.386.000	139.925.000	129.688.000	507.705.400	107.070.500	266.613.000	0,94	1,00	0,92	0,76	0,89	88	-62
Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	257.390.800	69.700.000	0	0	0	257.340.600	69.700.000	0	0	0	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-43	-67
Pengawasan lalu lintas angkutan laut dan kepelabuhanan	60.270.000	0	0	0	0	58.380.000	0	0	0	0	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-25	0
Pengawasan dan peningkatan pelayanan jasa transportasi udara	25.810.000	0	0	0	0	25.810.000	0	0	0	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25	0
11 Pengendalian dan pengamanan lalu lintas																0	0
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	191.250.000	0	330.000.000	0	0	191.000.000	0	328.875.000	0	0	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	-50	25
Pengadaan marka jalan	320.000.000	0	0	176.180.564	0	317.000.000	0	0	175.553.000	0	0,99	0,00	0,00	1,00	0,00	-50	25
Pengadaan pagar pengaman jalan	0	0	180.000.000	0	0	0	0	179.760.000	0	0	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	-25	25
Pengendalian kelancaran lalu lintas	0	39.050.000	10.400.000	0	0	0	36.057.000	10.400.000	0	0	0,00	0,92	1,00	0,00	0,00	-43	-37
Pengadaan traffic light	595.000.000	0	0	0	0	595.000.000	0	0	0	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25	0

Sumber : DPPA Dinas Perhubungan Kota Palu 2016-2020

Dari tabel di atas telah diuraikan mengenai target serta realisasi dari anggaran selama periode 2021-2026. Terdapat beberapa faktor baik eksternal maupun internal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Palu.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Palu**

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan maupun penurunan. Dimana diketahui pada Tahun 2018 mengalami Penurunan mencapai 5% namun pada Tahun 2019 terjadi Peningkatan yang mencapai angka 5,79 % (Badan Pusat Statistik Kota Palu, Tahun 2021). Hal ini tentunya akan diikuti dengan pertumbuhan peningkatan jumlah penduduk Kota Palu. Pertumbuhan tersebut akan menimbulkan peningkatan kebutuhan pelayanan, khususnya di bidang transportasi. Penurunan pertumbuhan ekonomi yang terjadi dikarenakan tahun 2018 wilayah Kota Palu mengalami Bencana Alam yaitu Gempa, Tsunami dan Likuifaksi sehingga menyebabkan kerusakan pada sarana dan prasana transportasi yang ada di wilayah Kota Palu. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut akan menjadi suatu tantangan dan sekaligus merupakan peluang dalam pengembangan pelayanan transportasi baik bagi Dinas Perhubungan Kota Palu maupun bagi stakeholder lainnya.

Berdasarkan telaah dokumen Renstra Kementerian Perhubungan, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi, Dokumen RTRW Kota Palu, dan Dokumen KLHS Sehingga dirumuskan beberapa tantangan dalam pengembangan Dinas Perhubungan Kota Palu.

Tantangan yang menjadi perhatian masyarakat adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan transportasi, khususnya pelayanan angkutan perkotaan dalam rute tetap dan teratur. Dimana sampai dengan saat ini penyelenggaraan angkutan perkotaan belum beroperasi sesuai jaringan trayek yang tetap dan teratur. Dengan hilangnya beberapa jalur jalan yang dilewati rute angkutan perkotaan

dan juga tingginya pertumbuhan kepemilikan kendaraan pribadi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Perhubungan Kota Palu, mengingat banyaknya penumpang angkutan kota yang beralih menggunakan kendaraan pribadi sehingga mempengaruhi kelangsungan usaha angkutan perkotaan.

Keberadaan angkutan umum yang beroperasi di dalam wilayah kota palu seringkali melakukan kegiatan naik turun penumpang atau bongkar muat barang di tepi jalan umum sehingga mengganggu kegiatan lalu lintas. Kondisi ini tentunya akan berpengaruh terhadap fungsi dari terminal sebagai tempat perpindahan penumpang , atau tujuan awal dan akhir perjalanan.

Merujuk kebijakan Direktorat Jenderal perhubungan Darat Kementerian Perhubungan untuk mengembangkan pelayanan angkutan massal berbasis kapasitas, pelayanan Bus Rapid Transit (BRT). Hal ini merupakan tantangan dan peluang untuk mulai menata angkutan massal sehingga terjadi keselarasan antara penyelenggaraan Angkutan Perkotaan (Angkot) dan pengembangan pelayanan angkutan massal.

Keberadaan kendaraan Angkutan Barang atau Peti Kemas yang melewati pusat kota seringkali menjadi salah satu penyebab kemacetan dikarenakan dimensi kendaraan yang besar, tidak hanya itu kelas jalan yang dilewati oleh angkutan barang/peti kemas tersebut tidak sesuai dengan kelas jalan yang seharusnya dilewati oleh angkutan barang/peti kemas sehingga berpotensi untuk merusak badan jalan. Hal ini menjadi tantangan dan juga kesempatan untuk menata jalur Angkutan barang/Peti kemas agar tidak melewati kelas jalan yang seharusnya dan juga tidak mengganggu kelancaran lalu lintas perkotaan.

Mengingat dengan pertumbuhan kendaraan 11-12% per-tahun (Kepolisian Republik Indonesia,2020) dan rendahnya pertumbuhan jalan dibawah 3% per-tahun maka diperlukan, Penataan sirkulasi arus lalu lintas, manajemen persimpangan, dan Pemberlakuan sistim arus 1

(satu) arah pada beberapa segmen ruas jalan dipandang perlu. Hal ini tentunya akan menjadikan wajah dan citra kota Palu lebih baik guna menyongsong kota Palu sebagai Kota Jasa yang didukung sistem lalu lintas yang lancar dan tertib.

Untuk menunjang kinerja sistem lalu lintas yang ada maka dibutuhkan juga prasarana transportasi seperti Alat Pengendali Lalu Lintas (APILL), Rambu , dan juga marka. Tidak hanya penunjang dibidang teknis penunjang non teknis seperti gedung kantor juga sebagai bentuk penunjang kinerja perhubungan sejak pasca gempa,tsunami, dan likuifkasi dinas perhubungan kota palu tidak memiliki fasilitas gedung kantor yang memadai.

Permasalahan parkir saat ini menjadi isu yang cukup strategis, dimulai dari pengelolaan yang belum efektif, banyaknya titik parkir yang belum terdaftar, tidak tertibnya juru parkir yang menyebabkan penerimaan pendapatan daerah dari sektor jasa parkir menjadi tidak optimal dan hal ini menjadi salah satu tantangan Dinas Perhubungan Kota Palu untuk segera melakukan pembenahan dan penataan lebih lanjut.

Tantangan yang juga menjadi perhatian masyarakat yaitu Pengujian Kendaraan Bermotor dimana pasca bencana gempa,tsunami, dan likuifaksi pada tahun 2018 UPT Pengujian Dinas Perhubungan Kota Palu kehilangan Sarana maupun Prasarana yaitu gedung dan alat pengujian kendaraan bermotor sehingga menyebabkan kendaraan wajib uji yang ada di Kota Palu belum bisa melakukan pengujian kendaraan bermotor hal ini menjadi salah satu tantangan Dinas Perhubungan Kota Palu untuk segera melakukan pembenahan kembali terhadap Sarana dan Prasana Pengujian Kendaraan Bermotor.

Dengan beberapa permasalahan yang telah diurai diatas dapat disimpulkan beberapa tantangan Dinas Perhubungan Kota Palu untuk

melakukan pembenahan, maka Dinas Perhubungan Kota Palu memiliki tantangan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan angkutan perkotaan yang belum beroperasi sesuai jaringan trayek yang tetap dan teratur;
2. Pengoptimalan kinerja terminal yang ada di wilayah kota palu;
3. Keselarasan pelayanan angkutan massal berbasis kapasitas yaitu *Bus Rapid Transit* (BRT) dengan angkutan perkotaan yang beroperasi di wilayah Kota Palu;
4. Penataan kembali jalur angkutan barang/peti kemas;
5. Diperlukannya manajemen lalu lintas di wilayah Kota Palu;
6. Menyediakan sarana dan prasarana perhubungan sebagai penunjang kinerja perhubungan dibidang teknis maupun non teknis;
7. Banyaknya titik parkir yang belum terdaftar dan juru parkir yang tidak tertib;
8. Pembenahan kembali sarana dan prasana pengujian kendaraan bermotor.

Adapun peluang yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Palu yaitu :

1. Pengembangan pelayanan angkutan massal berbasis kapasitas seperti pelayanan Bus Rapid Transit (BRT)
2. Dukungan Pemerintah dan Stakeholder terkait pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dinas Perhubungan Kota Palu
3. Adanya dokumen Teknis yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Palu dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya
4. adanya kesamaan sasaran serta program yang ada di K/L dan provinsi dengan Dinas Perhubungan Kota Palu.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALU**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Palu**

Secara garis besar dapat digambarkan kondisi penyelenggaraan perhubungan dalam Wilayah Kota Palu pada saat ini. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini:

**Tabel 3.1**  
 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Palu

<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Belum Optimalnya Penataan dan pengawasan trayek angkutan umum dan angkutan barang yang beroperasi di wilayah kota palu	Angkutan umum/ Angkutan Massal (BRT) yang tidak mengikuti jaringan trayek dan rute yang telah ditetapkan oleh Pemerintah	Belum maksimalnya penataan jaringan trayek dan rute angkutan umum / angkutan massal
		Pengemudi angkutan yang belum mengikuti jaringan trayek yang berlaku
		Kurangnya sosialisasi dari koperasi yang mewadahi angkutan umum yang ada di kota palu
		Kurangnya minat masyarakat terhadap angkutan umum di kota palu
		Belum adanya pengembangan angkutan Multi-Moda

	Belum maksimalnya penataan dan pengawasan jalur angkutan barang	<p>Angkutan Barang yang tidak mengikuti jalur yang sudah ditentukan</p> <p>Belum tersedianya pedoman teknis sebagai acuan pengendalian dan pengawasan angkutan barang</p> <p>Tidak tersedianya lahan untuk bongkar muat barang</p>
Belum Optimalnya penyelenggaraan pengelolaan perparkiran yang ada di kota palu	Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) belum optimal	Banyaknya titik dan juru parkir yang tidak terdaftar
		Mekanisme pengelolaan perparkiran yang masih menggunakan metode konvensional
	Pelayanan parkir yang belum efektif	<p>Belum tersedianya pedoman teknis sebagai acuan pelaksanaan, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan perparkiran</p> <p>Belum adanya lahan parkir atau kantong-kantong parkir di pusat komersial</p>
Belum optimalnya fungsi Terminal	Belum tersedianya fasilitas utama dan pendukung terminal yang memadai	Belum memiliki Terminal di dalam Perkotaan
		Belum maksimalnya pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja angkutan umum

		Keterbatasan dana untuk pembangunan fasilitas terminal
Belum optimalnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor di wilayah kota palu	Tidak Tersedianya gedung dan alat pengujian kendaraan bermotor pasca bencana	Keterbatasan dana untuk penyediaan sarana dan prasarana pengujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Belum terpenuhinya kebutuhan fasilitas sarana dan prasarana perhubungan	Belum Optimalnya penyediaan fasilitas teknis di bidang perhubungan darat	Belum optimalnya pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
		Belum maksimalnya ketersediaan fasilitas kelengkapan jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
		Adanya pembagian kewenangan terkait pengelolaan fasilitas kelengkapan jalan yang ada di wilayah kota palu
		Kurangnya pemahaman masyarakat akan pengetahuan kewenangan yang dimiliki dinas perhubungan kota palu

Tabel di atas menunjukkan kondisi permasalahan Dinas Perhubungan Kota Palu. Hal ini memerlukan solusi yang tepat, guna memecahkan berbagai masalah tersebut di atas.

### **3.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Wali Kota Palu dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2021 - 2026**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah RPJPD, RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, dimana Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kepala Daerah merupakan keadaan masa depan yang diharapkan dapat berjalan secara maksimal dan berbagai upaya akan dilakukan melalui program – program pembangunan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah yang terpilih. Adapun Visi Kota Palu Tahun 2021-2026 yaitu:

**“ MEMBANGUN KOTA PALU YANG MANDIRI, AMAN DAN NYAMAN, TANGGUH, SERTA PROFESIONAL DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN KEAGAMAAN”**

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut didukung dengan Misi Pemerintah Kota Palu yaitu sebagai berikut :

- 1) Membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global;
- 2) Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana;
- 3) Mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan covid-19; dan
- 4) Menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani.

Dengan 53 program unggulan yang menjadi prioritas dalam pembangunan dalam periode tahun 2021-2026, adapun 53 program tersebut yang diuraikan dalam beberapa aspek yaitu sebagai berikut :

❖ **Ekonomi**, terdiri dari :

1. 4 milyar untuk bedah rumah plus modal usaha perkelurahan;
2. Inkubator bisnis berbasis digital perkelurahan;
3. Penguatan UMKM;
4. Revitalisasi perparkiran Kota Palu;
5. Reformasi dan revitalisasi moda transportasi;
6. Kawasan ekonomi kreatif dan wisata religi;
7. Kawasan agrowisata layana dan petobo;
8. Revitalisasi pasar berbasis segmentasi;
9. Wisata pasar ikan Kota Palu;
10. 1.000 perahu untuk nelayan Kota Palu;
11. Kerjasama antar pemerintah daerah;
12. Forum komunikasi kreatif Kota palu.

❖ **Infrastuktur**, terdiri dari :

1. Bangun Palu tahan gempa;
2. Pembangunan gudang logistik bencana;
3. Waterfront Park Talise (Monumen tsunami);
4. Pembangunan kawasan olahraga Kota Palu;
5. Ruang terbuka hijau/*publik area* perkecamatan;
6. Pembangunan gedung kesenian Kota Palu.

❖ **Pelayanan Dasar**, terdiri dari :

- Kesehatan :
  1. Palu kota sehat;
  2. Transformasi puskesmas menjadi klinik modern;
  3. Satu ambulans satu kelurahan;

4. Bpjs gratis warga tidak mampu;
5. Tunjangan kesehatan dan santunan duka RT/RW,petugas rumah ibadah.

❖ **Pendidikan**, terdiri dari :

1. 1.000 beasiswa kuliah bagi keluarga tidak mampu seKota Palu;
2. Reward sebesar 2 milyar bagi SD dan SMP berprestasi;
3. Percepatan peningkatan persamaan kualitas sekolah SD dan SMP sekota palu;
4. Pelatihan tenaga kerja bersertifikat perkelurahan;
5. Update berkala kompetensi dan kapasitas guru/pengajar;
6. Bus gratis untuk siswa sekolah;
7. Kepala sekolah magang.

❖ **Sosial kependudukan**, terdiri dari :

1. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas kerja masyarakat padat karya;
2. Badan pelayanan rumah ibadah;
3. Palu berbagi;
4. Palu religi;
5. Pengembangan prasarana dan pelestarian seni budaya;
6. Palu ramah difabel;
7. Event olahraga tahunan se Kota Palu;
8. Event komunitastahunan anak muda Kota Palu'

❖ **Birokrasi dan Keuangan**, terdiri dari :

1. Audit APBD oleh auditor independent;
2. E-Government;
3. QSL (Quick service license= pelayanan perizinan cepat);
4. One touch info Kota Palu;

5. Penerapan ISO atas pelayanan publik disemua instansi;
6. Peningkatan kesejahteraan pegawai honorer;
7. ASN magang nasional;
8. Pelayanan pembuatan KTP, KK, dan Akta lahir di kantor kelurahan.

❖ **Lingkungan**, terdiri dari :

1. Palu adipura;
2. Palu terang;
3. Palu hijau;
4. Palu ramah;
5. CSR Forum;
6. Satgas cepat tanggap;
7. Kelurahan mantap 2 Milyar.

Dinas Perhubungan Kota Palu sesuai kewenangannya menyelenggarakan Misi ke II yaitu:

***“Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana”***

Dengan program unggulan dari 53 program Palu Mantap bergerak yang ingin dicapai yaitu :revitalisasi perparkiran Kota Palu, reformasi dan revitalisasi moda transportasi dan bus gratis untuk siswa. Dalam upaya mewujudkan program unggulan tersebut terdapat beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat. Adapun yang menjadi faktor penghambat dan pendorong dalam pencapaian tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.2, sebagai berikut:

**Tabel 3.2**

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Palu Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Program unggulan Dinas Perhubungan Kota Palu	Faktor	
		Penghambat	Pendorong/solusi
1	2	3	4
1	Revitalisasi perparkiran Kota Palu	kurangnya SDM	memanfaatkan SDM yang ada dengan mengikutsertakan bimtek/diklat teknis di bidang perhubungan
		minimnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan perparkiran	mengidentifikasi mengenai kebutuhan sarana dan prasaran terkait manajemen pengelolaan perparkiran yang kemudian di usulkan dalam dokumen penganggaran Dinas Perhubungan Kota Palu
		belum adanya regulasi teknis yang menjadi dasar pengelolaan perparkiran	menyusun kajian dalam bentuk peraturan daerah dan walikota mengenai penyelenggaraan perparkiran di Kota Palu
		banyaknya juru parkir liar dan pelanggaran parkir	melakukan pendataan, pembinaan serta pelatihan dan pengawasan terhadap juru parkir dan potensi titik parkir baru di Kota Palu

		kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya	melakukan sosialisasi dan menedukasi masyarakat mengenai pentingnya berpartisipasi dalam upaya perbaikan penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan di Kota Palu
2	Reformasi dan revitalisasi moda transportasi	belum lengkapnya data mengenai moda transportasi yang ada di Kota Palu termasuk dengan pembatasan kewenangan yang di miliki	melakukan pendataan kembali mengenai jumlah moda transportasi serta titik yang dibutuhkan dalam rangka pengoperasian moda transportasi khususnya transporatsi darat
		belum adanya data terbaru mengenai jalur yang mengatur kembali mengenai jalur pengoperasiaan untuk angkutan	melakukan pengkajian kembali terhadap kelayakan data yang ada
		belum layannya sarana dan prasarana pendukung dalam upaya mendukung reformasi dan revitalisasi moda transportasi	melakukan indentifikasi kebutuhan sarana dan prasaran dalam rangka pencapaian program ini yang kemudian diusulkan dalam dokumen penggangaaran Dinas Perhubungan kota palu
		belum adanya pengintegrasian moda transportasi di Kota Palu	melakukan kajian terhadap kebutuhan masyarakat untuk moda transportasi yang kemudiaan dilanjutkan dalam bentuk regulasi dalm rangka

			pengintegrasian
3	Bus gratis untuk siswa sekolah	belum adanya kajian teknis dalam upaya melaksanakan program bus gratis untuk siswa	melakukan pendataan awal mengenai titik sekolah, jumlah sekolah yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Palu serta kebutuhan operasional kendaraan dalam rangka pengoperasian bus untuk siswa sekolah
		kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan program bus gratis untuk siswa sekolah	melakukan koordinasi dengan kementerian perhubungan serta stakeholder terkait dalam rangka pemenuhan sarana untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat khususnya anak sekolah
			menyusun kebutuhan prasarana pendukung dalam pelaksanaan program bus gratis untuk siswa yang kemudian di usulkan dalam dokumen penganggaran Dinas Perhubungan Kota Palu
2	Reformasi dan revitalisasi moda transportasi	belum lengkapnya data mengenai moda transportasi yang ada di Kota Palu termasuk dengan	melakukan pendataan kembali mengenai jumlah moda transportasi serta titik yang dibutuhkan dalam

		pembatasan kewenangan yang di miliki	rangka pengoperasian moda transportasi khususnya transporatsi darat
		belum adanya data terbaru mengenai jalur yang mengatur kembali mengenai jalur pengoperasiaan untuk angkutan	melakukan pengkajian kembali terhadap kelayakan data yang ada
		belum layaknya sarana dan prasarana pendukung dalam upaya mendukung reformasi dan revitalisasi moda transportasi	melakukan indentifikasi kebutuhan sarana dan prasaran dalam rangka pencapaian program ini yang kemudian di usulkan dalam dokumen penggangaaran Dinas Perhubungan Kota Palu
		belum adanya pengintegrasian moda transportasi di Kota Palu	melakukan kajian terhadap kebutuhan masyarakat untuk moda transportasi yang kemudiaan dilanjutkan dalam bentuk regulasi dalm rangka pengintegrasian
3	Bus gratis untuk siswa sekolah	belum adanya kajian teknis dalam upaya melaksanakan program bus gratis untuk siswa	melakukan pendataan awal mengenai titk sekolah, jumlah sekolah yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Palu serta kebutuhan operasional

			kendaraan dalam rangka pengoperasian bus untuk siswa sekolah
		kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan program bus gratis untuk siswa sekolahh	melakukan koordinasi dengan kementerian perhubungan serta stakeholder terkait dalam rangka pemenuhan sarana untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat khususnya anak sekolah

			menyusun kebutuhan prasarana pendukung dalam pelaksanaan program bus gratis untuk siswa yang kemudian di usulkan dalam dokumen penganggaran Dinas Perhubungan Kota Palu
--	--	--	---

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Palu

Dari tabel di atas dapat dilihat beberapa faktor penghambat yang menjadi gambaran awalan dalam upaya pelaksanaan program unggulan yang menjadi tanggung jawab dari Dinas Perhubungan Kota Palu. Selain itu, terdapat juga faktor pendorong berupa solusi dalam upaya memecahkan beberapa masalah yang ada. Dimana, jika faktor pendorong tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, dengan mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kota Palu maka implementasi terhadap misi II serta program unggulan pemerintah Kota Palu dapat terwujud.

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan RI dan Dinas Perhubungan Propinsi Sulawesi Tengah**

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Presiden maka visi dan misi tersebut dijabarkan menjadi sasaran pembangunan nasional beserta indikator sektor transportasi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024. Dengan mengidentifikasi masalah pelayanan yang ada pada sektor transportasi darat yang di uraikan dalam Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024.

Sasaran strategis transportasi nasional berdasarkan RENSTRA Kementerian Perhubungan 2020-2024 dirumuskan menjadi 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu terwujudnya konektivitas nasional, meningkatnya indeks kinerja pelayanan perhubungan, serta meningkatnya indeks kinerja pelayanan perhubungan.

Dalam mewujudkan sasaran strategis di atas, Kementerian Perhubungan menetapkan arah kebijakan dan strategi implementasi sebagaimana dijabarkan.

#### 1. Terwujudnya Konektivitas Nasional

- Optimalisasi simpul transportasi eksisting
- Pembangunan simpul transportasi baru
- Pembagian konditi barang ekspor-impor pada pelabuhan di seluruh indonesia
- Reaktivasi jalur moda transportasi
- Mengoptimalkan sinergi angkutan umum dengan moda transportasi lokal
- Optimalisasi Pendistribusian barang di seluruh wilayah indonesia
- Penempatan pejabat fungsional sesuai kebutuhan pembangunan dan pengembangan simpul transportasi
- Penyiapan kompetensi keahlian proffesional pada jabatan fungsional pembangunan dan pengembangan serta pengoperasian simpul transportasi di seluruh wilayah indonesia
- Perumusan tindak lanjut pembangunan berkelanjutan setelah operasional simpul transportasi di seluruh wilayah indonesia
- Pembangunan fasiltas alih moda di simpul utama transportasi

- Pembangunan pergudangan pada simpul utama transportasi
- Penggunaan Traffic Demand Management di seluruh wilayah perkotaan
- Pembangunan sistem basis data dan penggunaan Traffic Demand Management
- Kajian peraturan yang mendukung terwujudnya kegiatan multimoda

## 2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan

- Pengurangan waktu tunggu dan waktu perjalanan transportasi
- Evaluasi sistem dan peraturan yang telah ada untuk menari akar permasalahan delay yang terjadi pada sistem layanan transportasi
- Pengukuran tingkat kepuasan layanan pengguna jasa moda transportasi
- Pencatatan jumlah keluhan pengguna layanan pengguna jasa moda transportasi
- Penyusunan instrumen untuk mengukur tingkat kepuasan layanan pengguna jasa transportasi
- Pembuatan instrumen penatatan keluhan pengguna layanan pengguna jasa transportasi
- Pengukuran tingkat kepuasan layanan penggunaan jasa moda transportasi perkotaan di wilayah jabodetabek
- Pencatatan jumlah keluhan pengguna layanan pengguna jasa moda transportasi perkotaan di wilayah Jabodetabek;

- Melakukan pencatatan atas data yang diperoleh untuk bahan evaluasi sistem pengukuran indeks kepuasan konsumen pengguna jasa transportasi dan peraturan yang telah ada;
- Memfasilitasi tersedianya klinik SDM untuk berkontribusi pada pendampingan perbaikan sistem layanan sebagai umpan balik catatan keluhan pengguna layanan jasa transportasi;
- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja pelayanan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Pengamatan penerapan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi yang dilaksanakan di UPT;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penerapan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi yang dilaksanakan di UPT bidang transportasi;
- Penyusunan program pengembangan SDM pelaku jasa layanan transportasi untuk memenuhi harapan pengguna jasa transportasi sesuai standar pelayanan yang diberlakukan
- Peningkatan pemenuhan standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi;
- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja OTP pada pelayanan moda transportasi;
- Mengembangkan prototipe sistem informasi transportasi sebagai inovasi teknologi layanan yang mampu menyajikan kondisi real time OTP;

- Membangun SDM yang mampu melakukan desain dan rekayasa teknologi rancang bangun sistem informasi kinerja capaian OTP sektor transportasi;
- Membangun SDM yang mampu melakukan analisis dan evaluasi kinerja capaian OTP sektor transportasi;
- Melakukan koreksi dan pemberian disinsentif atas tidak tercapainya target kinerja OTP yang dilakukan oleh operator dan pihak terkait lainnya;
- Penyiapan perancangan, pembangunan, pengembangan, dan pengujian sistem aplikasi, basis data, dan infrastruktur terkait dengan pengukuran kinerja OTP sektor perhubungan
- Pencatatan jumlah pengguna pelayanan umum massal berbasis moda unggulan di daerah perkotaan;
- Optimalisasi kebutuhan SDM pelayanan dalam pelayanan umum massal berbasis moda unggulan di daerah perkotaan;
- Penggunaan data dan informasi dalam penerapan pelayanan umum massal berbasis moda unggulan di daerah perkotaan.
- Melakukan pencatatan atas data yang diperoleh untuk bahan evaluasi sistem dan peraturan yang telah ada.

### 3. Meningkatkan Keselamatan Transportasi

- Ratifikasi peraturan internasional tentang keselamatan dan keamanan pelayaran dan penerbanga;
- Penegakan hukum atas aturan yang diberlakukan;
- Peningkatan upaya kampanye dan sosialisasi keselamatan transportasi;

- Pemanfaatan teknologi untuk penyusunan database kecelakaan darat, laut, udara dan perkeretaapian, KIR online travel data recording;
- Pengembangan aplikasi pengaduan pelayanan transportasi untuk menunjang keamanan dan keselamatan transportasi;
- Kontrol kelengkapan keselamatan dan keamanan moda angkutan;
- Pembatasan usia kendaraan layanan moda angkutan umum
- Kontrol kelengkapan keselamatan dan keamanan moda angkutan;
- Pembatasan usia kendaraan layanan moda angkutan umum
- Penyusunan dan penerapan SOP keamanan di setiap lokasi simpul utama transportasi;
- Pengembangan sistem online monitoring di setiap simpul utama transportasi.
- Peningkatan sertifikasi sarana dan prasarana kereta api;
- Penyusunan dan distribusi modul-modul edukasi keselamatan kepada masyarakat (untuk semua moda);
- Penyusunan dan sosialisasi modul-modul edukasi security awareness kepada masyarakat (untuk semua moda);
- Pelatihan petugas keamanan untuk semua moda;
- Perbaikan dan pengembangan SOP keselamatan untuk setiap moda;

- Penyusunan modul dan pelaksanaan pelatihan edukasi dan keselamatan untuk pengemudi moda transportasi

Keberadaan Visi Misi Provinsi Sulawesi Tengah juga merupakan konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, sehingga dapat menjadi daya pendorong dan daya ungkit (leverage) bagi seluruh komponen masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang dicita-citakan. Dengan mengidentifikasi masalah pelayanan Dinas Perhubungan Kota Palu dan Sasaran Jangka Menengah RenstraDinas Perhubungan Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021.

Salah satu sasaran RENSTRA Dishub provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016-2021 yaitu meningkatnya kualitas layanan transportasi dengan strategi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan sistem perencanaan dan pengawasan pembangunan perhubungan yang berkelanjutan.
- 2) Meningkatkan pengadaan dan pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan
- 3) Meningkatkan kinerja angkutan dan lalu lintas jalan
- 4) Meningkatkan kinerja Pelayanan dan Keselamatan angkutan , lalu lintas dan UPT PKB
- 5) Mengembangkan sistem angkutan umum massal berbasis jalan

maka dapat diketahui faktor penghambat dan pendorong:

Berdasarkan telaah RENSTRA Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan Darat dan RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah dapat di simpulkan faktor penghambat

dan pemendorong yang dapat memperngaruhi pelayanan Dinas Perhubungan Kota Palu, yaitu :

a. Faktor Penghambat

- 1) Belum Optimalnya Koordinasi antara Kementrian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Kota Palu
- 2) Pembatasan kewenangan dalam pengelolaan transportasi darat
- 3) Belum maksimalnya sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Kota Palu

b. Faktor Pendukung

- 1) Adanya sinergitas antara sasaran RENSTRA Direktorat Perhubungan Darat, RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah dan RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Palu.
- 2) Adanya Sinergitas dari Dinas Perhubungan Kota Palu terhadap Direktorat Perhubungan Darat dan Dinas Perhubungan Provinsi dalam Upaya perbaikan pelayanan transportasi darat di wilayah Kota Palu.

### **3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Mengacu pada rencana struktur ruang RTRW Kota Palu tahun 2021/2041 meliputi yaitu :

#### **3.4.1 Rencana Jaringan Jalan**

Jaringan jalan nasional meliputi jaringan jalan arteri primer dan kolektor primer melalui :

- a. Jaringan jalan arteri sekunder
  - Jalan Arteri Sekunder terdiri dari 12 Ruas jalan dengan total panjang jalan adalah 11.78 km.

- Jl. Cumi-cumi dan Jl. Raja Moili perlu perbaikan jalan rusak akibat tsunami

**Tabel 3.3**  
Rencana Jaringan Jalan Kota Fungsi Jalan Arteri Sekunder Kota Palu

No	Jalan	Panjang (Km)	Status Jalan	Keterangan
<b>C</b>	<b>Jalan Kota</b>			
1	Jl. Wahid Hasyim	0.600	JAS	
2	Jl. Garuda	2.199	JAS	
3	Jl. Maleo	2.125	JAS	
4	Jl. Veteran	1.165	JAS	
5	Jl. H. Hayyun	0.395	JAS	
6	Jl. Kimaja	0.537	JAS	
7	Jl. Danau Poso	0.210	JAS	Ex. Jalan Nasional
8	Jl. S. Dolago	0.210	JAS	Ex. Jalan Nasional
9	Jl. Cumi-cumi Taman Ria	2.430	JAS	
10	Jl. Komodo	1.300	JAS	Penggabungan ruas
11	Jl. Raja Moili	1.921	JAS	
12	Jl. S. Gumbasa	0.220	JAS	Ex. Jalan Nasional
	<b>Total</b>	<b>11.78</b>		

b. Jaringan Jalan Kolektor Sekunder

- Jalan Kolektor Sekunder yang terdiri dari 84 Ruas jalan dengan total panjang jalan kolektor sekunder adalah 87.654 km.
- Rencana jalan kolektor sekunder yang menghubungkan Tondo-Layana Indah untuk mendorong pertumbuhan kawasan dengan panjang 4,5 km.

- Rencana Jalan kolektor sekunder tepi Sungai Palu bagian barat untuk mendorong pola ruang perdagangan jasa dan perkantoran sepanjang tepi sungai. dengan panjang 11,77.
- Rencana Jalan kolektor sekunder tepi Sungai Palu bagian timur untuk mendorong pola ruang perdagangan jasa dan perkantoran sepanjang tepi sungai dengan panjang 11,27.

**Tabel 3.4**

Rencana Jaringan Jalan Kota Fungsi Jalan Kolektor Sekunder  
Kota Palu

<b>No.</b>	<b>Jalan</b>	<b>Panjang (Km)</b>	<b>Fungsi Hirarki</b>	<b>Keterangan</b>
<b>C</b>	<b>Jalan Kota</b>			
1	Jl. Cendrawasih	1.099	JKS	
2	Jl. Nuri	0.605	JKS	
3	Jl. Balai Kota Selatan	0.428	JKS	
4	Jl. Balai Kota	0.33	JKS	
5	Jl. Mamara	3.169	JKS	
6	Jl. Gunung Lolo (Megawati)	1.097	JKS	
7	Jl. Woodward	0.444	JKS	
8	Jl. Tombolotutu	1.683	JKS	
9	Jl. Pendidikan (depan Untad)	1.02	JKS	
10	Jl. Uwe Salura	1.5	JKS	
11	Jl. H.M. Suharto (Ex Tanggul Mas)	6.1	JKS	Penyesuaian Jalan
12	Jl. Togian	0.139	JKS	
13	Jl. Gunung Tinombala	0.159	JKS	
14	Jl. Kenduri	0.195	JKS	
15	Jl. Danau Lindu	0.297	JKS	
16	Jl. Mas Mansyur	0.324	JKS	
17	Jl. Palola/Terung	0.330	JKS	
18	Jl. Cut Nyak Dhien	0.331	JKS	
19	Jl. Mokolembake	0.392	JKS	
20	Jl. Tadulako	0.392	JKS	
21	Jl. Elang	0.398	JKS	

<b>No.</b>	<b>Jalan</b>	<b>Panjang (Km)</b>	<b>Fungsi Hirarki</b>	<b>Keterangan</b>
<b>C</b>	<b>Jalan Kota</b>			
22	Jl. Dr. Soetomo	0.403	JKS	
23	Jl. Tanjung Karang	0.433	JKS	
24	Jl. Agus Salim	0.450	JKS	
25	Jl. Raden Saleh	0.465	JKS	
26	Jl. Nokilalaki	0.475	JKS	
27	Jl. Cik Di Tiro	0.486	JKS	
28	Jl. Gunung Sidole	0.491	JKS	
29	Jl. Tanjung Santigi	0.513	JKS	
30	Jl. Jati Baru	0.548	JKS	
31	Jl. Kakatua	0.570	JKS	
32	Jl. Abd. Raqib	0.579	JKS	
33	Jl. Ahmad Dahlan	0.579	JKS	
34	Jl. Lagarutu	3.280	JKS	
35	Jl. Pangeran Hidayat	0.599	JKS	
36	Jl. Munif Rahman I	0.600	JKS	
37	Jl. Tangkasi	0.609	JKS	
38	Jl. Cempedak	0.632	JKS	
39	Jl. Dr. Wahidin	0.635	JKS	
40	Jl. Veteran	1.805	JKS	
41	Jl. Danau Talaga	0.666	JKS	
42	Jl. Kemiri	0.681	JKS	
43	Jl. Masjid Raya	0.720	JKS	
44	Jl. Maluku	0.751	JKS	
45	Jl. Bunga Raya	0.752	JKS	
46	Jl. Gatot Subroto	0.754	JKS	
47	Jl. Tanjung Tururuka	0.761	JKS	
48	Jl. Tanjung Dako	0.765	JKS	
49	Jl. Dr. Soeharso	0.822	JKS	
50	Jl. Merpati	0.855	JKS	
51	Jl. Kelor	0.863	JKS	
52	Jl. S. Parman	1.179	JKS	
53	Jl. Patimura	0.866	JKS	
54	Jl. Datu Adam	0.870	JKS	
55	Jl. Sungai Lariang	0.883	JKS	
56	Jl. Thalua Konchi	0.890	JKS	
57	Jl. Zebra	0.899	JKS	
58	Jl. Durian	0.926	JKS	
59	Jl. Bantilan	0.959	JKS	
60	Jl. M.H Thamrin	1.028	JKS	

No.	Jalan	Panjang (Km)	Fungsi Hirarki	Keterangan
<b>C</b>	<b>Jalan Kota</b>			
61	Jl. Kedondong	1.035	JKS	
62	Jl. Jati	1.057	JKS	
63	Jl. Tanjung Satu	1.085	JKS	
64	Jl. A. Yani	1.115	JKS	
65	Jl. Lasoso	1.167	JKS	
66	Jl. Kijang	1.217	JKS	
67	Jl. Soeprapto	1.258	JKS	
68	Jl. Manggis	1.268	JKS	
69	Jl. Bulu Masomba	1.299	JKS	
70	Jl. WR. Supratman	1.324	JKS	
71	Jl. Adam Malik	1.424	JKS	
72	Jl. Setia Budi	1.449	JKS	
73	Jl. Banteng	1.472	JKS	
74	Jl. Hang Tuah	1.482	JKS	
75	Jl. Tanjung Manimbaya	1.534	JKS	
76	Jl. R.A Kartini	1.570	JKS	
77	Jl. Anoa	1.679	JKS	
78	Jl. Sungai Manonda	1.879	JKS	
79	Jl. Cut Mutia	0.200	JKS	
80	Jl. Terminal Mamboro	2.227	JKS	
81	Jl. Lingkar Pantai Talise – Tondo	2.400	JKS	
82	Jl. Karana	2.777	JKS	
83	Jl. Togolele	4.104	JKS	
84	Jl. Teuku Umar	0.158	JKS	
85	Rencana jalan menghubungkan Talise-Tondo-Mamboro-Taipa	11.530	JKS	
86	Rencana jalan tepi Sungai Palu bagian barat	11,77	JKS	
87	Rencana jalan tepi Sungai Palu bagian Timur	11,27	JKS	
	<b>Total</b>	<b>122,224</b>		

c. Jaringan Jalan Lokal Sekunder

Jalan Lokal Sekunder yang terdiri dari 708 Ruas jalan dengan Total panjang jalan Lokal Sekunder adalah 351.098 km.

**Tabel 3.5**  
Rencana Jaringan Jalan Kota Fungsi Jalan Lokal Sekunder  
Kota Palu

<b>No.</b>	<b>Jalan</b>	<b>Panjang (Km)</b>	<b>Fungsi Hirarki</b>	<b>Keterangan</b>
<b>B</b>	<b>Jalan Kota</b>			
1	Jl. Agatis Lr	0.159	JLS	
2	Jl. Agatis Lr. Damai	0.121	JLS	
3	Jl. Anggrek Lr	0.472	JLS	
4	Jl. Anggur I Lr. I	0.198	JLS	
5	Jl. Anggur I Lr. II	0.215	JLS	
6	Jl. Anggur II Lr.	0.100	JLS	
7	Jl. Anggur Lr.	0.185	JLS	
8	Jl. Anyelir Lr.	0.494	JLS	
9	Jl. Asam I Lr.	0.297	JLS	
10	Jl. Asam II Lr.	0.700	JLS	
11	Jl. Asam II Lr. I	0.350	JLS	
12	Jl. Asam II Lr. II	0.106	JLS	
13	Jl. Asam II Lr. III	0.362	JLS	
14	Jl. Asam II Lr. IV	0.168	JLS	
15	Jl. Asam II Lr. V	0.088	JLS	
16	Jl. Asam III Lr. Setapak	0.697	JLS	
17	Jl. Asam Lr.	0.296	JLS	
18	Jl. Bambu Lr.	0.378	JLS	
19	Jl. Bantilan Lr.	0.501	JLS	
20	Jl. Bantilan Lr. III	0.407	JLS	
21	Jl. Belimbing II Lr. II	0.150	JLS	
22	Jl. Beringin Lr.	0.673	JLS	
23	Jl. Beringin Lr. I	0.229	JLS	
24	Jl. Beringin Lr. III	0.117	JLS	
25	Jl. Buah Pala Lr. Duri	0.310	JLS	
26	Jl. Cakalang Lr.	0.644	JLS	
27	Jl. Cakalang Lr. I	0.092	JLS	
28	Jl. Cemangi Lr.	0.091	JLS	
29	Jl. Cemangi Lr. I	0.090	JLS	
30	Jl. Cemara Lr. I	0.184	JLS	
31	Jl. Cemara Lr. II	0.207	JLS	
32	Jl. Cempedak Lr. Bayam	0.338	JLS	
33	Jl. Cempedak Lr. I	0.186	JLS	
34	Jl. Cempedak Lr. II	0.377	JLS	
35	Jl. Cendana Lr.	0.173	JLS	

<b>No.</b>	<b>Jalan</b>	<b>Panjang (Km)</b>	<b>Fungsi Hirarki</b>	<b>Keterangan</b>
<b>B</b>	<b>Jalan Kota</b>			
36	Jl. Cendana Lr. I	0.060	JLS	
37	Jl. Cendana Lr. II	0.044	JLS	
38	Jl. Danau Talaga Lr.	0.417	JLS	
39	Jl. Datu Pamusu Lr Datu Pamusu I	0.187	JLS	
40	Jl. Datu Pamusu Lr.	0.124	JLS	
41	Jl. Datu Pamusu Lr. Depas	0.268	JLS	
42	Jl. Diponegoro Lr.	0.209	JLS	
43	Jl. Diponegoro Lr. I	0.242	JLS	
44	Jl. Durian Lr.	0.311	JLS	
45	Jl. Duyu Lr.	1.138	JLS	
46	Jl. Ganogo I Lr.	0.670	JLS	
47	Jl. Ganogo II Lr.	0.164	JLS	
48	Jl. Gawalise Lr	2.642	JLS	
49	Jl. H.O.S Cokroaminoto Lr.	0.225	JLS	
50	Jl. Herianto Lr. I	0.297	JLS	
51	Jl. Jaelangkara Lr.	0.116	JLS	
52	Jl. Jambu Lr. Jambu Montok	0.225	JLS	
53	Jl. Jamur Lr.	0.581	JLS	
54	Jl. Jamur Lr. II	0.262	JLS	
55	Jl. Jamur Lr. III	0.283	JLS	
56	Jl. Jamur Lr. IV	0.140	JLS	
57	Jl. Jati Baru Lr. II	0.065	JLS	
58	Jl. Jati Baru Lr. I	0.197	JLS	
59	Jl. Jati Baru Lr. III	0.245	JLS	
60	Jl. Jati Lr.	0.465	JLS	
61	Jl. Jati Lr. I	0.165	JLS	
62	Jl. Jati Lr. II	0.290	JLS	
63	Jl. Jati Lr. III	0.332	JLS	
64	Jl. Jati Lr. IV	0.107	JLS	
65	Jl. Jati Lr. VI	0.362	JLS	
66	Jl. Jati Lr. VII	0.228	JLS	
67	Jl. Jati Lr. VIII	0.357	JLS	
68	Jl. Datu Adam Lr.	0.153	JLS	
69	Jl. Kacang Panjang Lr.	0.119	JLS	
70	Jl. Kalora Lr. Balita	0.090	JLS	
71	Jl. Kalora Lr. Lapangan	0.389	JLS	
72	Jl. Kamboja Lr	0.289	JLS	

<b>No.</b>	<b>Jalan</b>	<b>Panjang (Km)</b>	<b>Fungsi Hirarki</b>	<b>Keterangan</b>
<b>B</b>	<b>Jalan Kota</b>			
73	Jl. Kangkung Lr.	0.477	JLS	
74	Jl. Kanna Lr. I	0.224	JLS	
75	Jl. Kanna Lr. II	0.152	JLS	
76	Jl. Kanuna Lr.	0.345	JLS	
77	Jl. Kayu Nunu	0.280	JLS	
78	Jl. Kayu Nunu Lr. I	0.072	JLS	
79	Jl. Kedondong II Lr.	0.128	JLS	
80	Jl. Kedondong Lr.	0.307	JLS	
81	Jl. Kedondong Lr. I	0.381	JLS	
82	Jl. Kedondong Lr. II	0.521	JLS	
83	Jl. Kedondong Lr. III	0.215	JLS	
84	Jl. Kedondong Lr. IV	0.200	JLS	
85	Jl. Kedondong Lr. Palapa	0.059	JLS	
86	Jl. Kelapa Gading Lr.	0.204	JLS	
87	Jl. Kelapa II Lr.	0.205	JLS	
88	Jl. Kelapa III Lr.	0.212	JLS	
89	Jl. Kelor Lr.	0.585	JLS	
90	Jl. Kelor Lr. I	0.076	JLS	
91	Jl. Kelor Lr. II	0.114	JLS	
92	Jl. Kelor Lr. III	0.223	JLS	
93	Jl. Kemiri Lr	0.068	JLS	
94	Jl. Kemuning Lr.	0.199	JLS	
95	Jl. Kenari VIII	0.070	JLS	
96	Jl. Keramik Lr.	2.770	JLS	
97	Jl. Keramik Lr. Keramik	0.240	JLS	
98	Jl. Kinore	0.194	JLS	
99	Jl. Komp. Al - Khaerat	0.230	JLS	
100	Jl. Komp. BTN Palu Nagaya	1.025	JLS	
101	Jl. Komp. BTN Palu Permai	7.500	JLS	
102	Jl. Komp. BTN PEPABRI	2.328	JLS	
103	Jl. Komp. BTN Silae	3.508	JLS	
104	Jl. Komp. Masjid Agung Darussalam	0.953	JLS	
105	Jl. Krimun Lr.	0.176	JLS	
106	Jl. Labu Lr. III	0.514	JLS	
107	Jl. Labu Lr. Man	0.278	JLS	
108	Jl. Lamotu Lr.	0.181	JLS	
109	Jl. Langsung Lr.	0.510	JLS	

<b>No.</b>	<b>Jalan</b>	<b>Panjang (Km)</b>	<b>Fungsi Hirarki</b>	<b>Keterangan</b>
<b>B</b>	<b>Jalan Kota</b>			
110	Jl. Lasoso Lr.	0.065	JLS	
111	Jl. Lasoso Lr. I	0.630	JLS	
112	Jl. Lasoso Lr. II	0.357	JLS	
113	Jl. Lasoso Lr. VI	0.273	JLS	
114	Jl. Lasosoe Lr. VII	0.144	JLS	
115	Jl. Lengarur Lr. I	0.066	JLS	
116	Jl. Lombok Lr. I	0.282	JLS	
117	Jl. Lombok Lr. II	0.141	JLS	
118	Jl. Lombok Lr. III	0.159	JLS	
119	Jl. Lr. Ambalat	0.125	JLS	
120	Jl. Malonda Lr	1.382	JLS	
121	Jl. Malonda Lr. Ulujadi	1.474	JLS	
122	Jl. Mangga Lr.	0.073	JLS	
123	Jl. Manggis II	0.187	JLS	
124	Jl. Manggis Lr.	0.854	JLS	
125	Jl. Manggis Lr. I	0.358	JLS	
126	Jl. Manggis Lr. II	0.139	JLS	
127	Jl. Manggis Lr. Sagu	0.266	JLS	
128	Jl. Mas Mansyur Lr.	0.077	JLS	
129	Jl. Matako Lr. Setapak	0.091	JLS	
130	Jl. Munif Rahman I Lr.	0.123	JLS	
131	Jl. Munif Rahman II Lr.	0.099	JLS	
132	Jl. Munif Rahman Lr.	3.879	JLS	
133	Jl. Munif Rahman Lr. Bugis	0.208	JLS	
134	Jl. Munif Rahman Lr. Smp 13	0.439	JLS	
135	Jl. Nangka Lr.	0.152	JLS	
136	Jl. Nenas II Lr.	0.127	JLS	
137	Jl. Nenas Lr. I	0.124	JLS	
138	Jl. Padanjakaya Lr.	0.728	JLS	
139	Jl. Padanjakaya Lr. Asam	0.474	JLS	
140	Jl. Padat Karya Lr.	2.871	JLS	
141	Jl. Palola Lr.	0.126	JLS	
142	Jl. Palola Lr. I	0.083	JLS	
143	Jl. Pangeran Hidayat Lr I	0.426	JLS	
144	Jl. Pangeran Hidayat Lr II	0.229	JLS	
145	Jl. Penanda Lr.	0.972	JLS	
146	Jl. Pimpilido Lr.	0.158	JLS	

<b>No.</b>	<b>Jalan</b>	<b>Panjang (Km)</b>	<b>Fungsi Hirarki</b>	<b>Keterangan</b>
<b>B</b>	<b>Jalan Kota</b>			
147	Jl. Pipa Air Lr. I	0.190	JLS	
148	Jl. Puebongo Lr.	0.309	JLS	
149	Jl. Puebongo Lr. I	0.125	JLS	
150	Jl. Puenjidi Lr. Mitra	0.575	JLS	
151	Jl. Puenjidi Lr. Proklamasi	0.069	JLS	
152	Jl. Rambutan Lr.	0.096	JLS	
153	Jl. Reformasi	0.156	JLS	
154	Jl. Salambara Lr.	0.108	JLS	
155	Jl. Salambara Lr. Nuri	0.096	JLS	
156	Jl. Samudra II Lr. Basodara	0.055	JLS	
157	Jl. Samudra II Lr. I	0.202	JLS	
158	Jl. Samudra II Lr. II	0.237	JLS	
159	Jl. Samudra II Lr. III	0.203	JLS	
160	Jl. Samudra II Lr. Mandiri	0.410	JLS	
161	Jl. Samudra Lr. Bugis	0.076	JLS	
162	Jl. Samudra Lr. V	0.050	JLS	
163	Jl. Selar Lr. I	0.146	JLS	
164	Jl. Seruni Lr.	0.570	JLS	
165	Jl. Seruni Lr. III	0.149	JLS	
166	Jl. Siranindi Lr.	0.086	JLS	
167	Jl. Srikaya Lr. Sirsak II	0.055	JLS	
168	Jl. Sultan Allauddin Lr.	0.283	JLS	
169	Jl. Sumur Yuga Lr.	1.460	JLS	
170	Jl. Sungai Balantak Lr.	0.125	JLS	
171	Jl. Sungai Kinore Lr.	0.205	JLS	
172	Jl. Sungai Kinore Lr. Al Munawarah	0.060	JLS	
173	Jl. Sungai Lambangan I Lr	0.220	JLS	
174	Jl. Sungai Lariang Lr.	0.250	JLS	
175	Jl. Sungai Manonda Lr.	0.251	JLS	
176	Jl. Sungai Manonda Lr. Madongsol	0.340	JLS	
177	Jl. Sungai Manonda Lr. Syukur	0.224	JLS	
178	Jl. Sungai Miu Lr	0.183	JLS	
179	Jl. Sungai Ogotion Lr.	0.075	JLS	
180	Jl. Sungai Palu I	1.565	JLS	
181	Jl. Sungai Saddan Lr.	0.277	JLS	
182	Jl. Sungai Saddan Lr.	0.055	JLS	

<b>No.</b>	<b>Jalan</b>	<b>Panjang (Km)</b>	<b>Fungsi Hirarki</b>	<b>Keterangan</b>
<b>B</b>	<b>Jalan Kota</b>			
	Benteng			
183	Jl. Sungai Sausu Lr.	0.184	JLS	
184	Jl. Sungai Surumana Lr. I	0.179	JLS	
185	Jl. Sungai Wera Lr.	0.513	JLS	
186	Jl. Sungai Wera Lr. 1	0.267	JLS	
187	Jl. Sungai Wuno Lr	0.359	JLS	
188	Jl. Tamberante Lr.	0.110	JLS	
189	Jl. Tanamea Lr.	0.231	JLS	
190	Jl. Tanderante Lr. Amal	0.281	JLS	
191	Jl. Tanderante Lr. Kenanga	0.246	JLS	
192	Jl. Tanjung Bulu Lr. II	0.121	JLS	
193	Jl. Tembang Lr.	0.371	JLS	
194	Jl. Tembang Lr. I	0.294	JLS	
195	Jl. Tembang Lr. II	0.206	JLS	
196	Jl. Teuku Umar Lr. Monteza	0.082	JLS	
197	Jl. Tolambu Lr. Babussalam	0.212	JLS	
198	Jl. Tolambu Lr. I	0.273	JLS	
199	Jl. Wahid Hasyim Lr.	0.221	JLS	
200	Jl. Watueja Lr.	0.950	JLS	
201	Jl. WR. Supratman Lr.	0.652	JLS	
202	Jl. Yambaare Lr. I	0.203	JLS	
203	Jl. Bunga Raya Lr	0.429	JLS	
204	Jl. D.S Lamangkona Lr. I	0.101	JLS	
205	Jl. D.S Lamangkona Lr. II	0.260	JLS	
206	Jl. D.S Lamangkona Lr. Masjid Al Mu	0.044	JLS	
207	Jl. Dodorovulu Lr. Lapangan	0.205	JLS	
208	Jl. H. Samauna Lr.	0.414	JLS	
209	Jl. Ippi Lr.	0.507	JLS	
210	Jl. Kabasara Lr. Kayuvalo	0.337	JLS	
211	Jl. Karana Lr. Setapak I	1.363	JLS	
212	Jl. Karana Setapak 3	0.588	JLS	
213	Jl. Labu Lembah Lr. Uve Langga	0.075	JLS	
214	Jl. Labuan Mberu Lr. Launu	0.634	JLS	
215	Jl. Labuan Mberu Lr.	0.489	JLS	

<b>No.</b>	<b>Jalan</b>	<b>Panjang (Km)</b>	<b>Fungsi Hirarki</b>	<b>Keterangan</b>
<b>B</b>	<b>Jalan Kota</b>			
	Setapak			
216	Jl. Lapangan Tawaeli	0.112	JLS	
217	Jl. Lasapandi Lr	0.171	JLS	
218	Jl. Lentora Lr.	0.797	JLS	
219	Jl. Limran Lr	1.251	JLS	
220	Jl. Malino Lr. Malino	0.060	JLS	
221	Jl. Mangu Lr.	1.298	JLS	
222	Jl. Mantilayo Lr.	0.631	JLS	
223	Jl. Mardjuni Lr.	0.261	JLS	
224	Jl. Moh. Amin Lr.	2.663	JLS	
225	Jl. Moma Lr.	0.167	JLS	
226	Jl. Ndatengisi Lr	0.375	JLS	
227	Jl. Pagaru Lemba Lr.	0.420	JLS	
228	Jl. Pengalemba Lr.	0.644	JLS	
229	Jl. Pue Garuda Setapak	1.749	JLS	
230	Jl. Pue Lomba Lr. I	0.093	JLS	
231	Jl. Pue Mbala Lr. 1	0.261	JLS	
232	Jl. Pue Nteda Lr. I	0.107	JLS	
233	Jl. S. Palayua Lr. I	0.061	JLS	
234	Jl. Sarovele Lr.	0.490	JLS	
235	Jl. Singgani Lr.	0.130	JLS	
236	Jl. Sinombili Lr.	0.075	JLS	
237	Jl. Sintuvu Lr.	0.844	JLS	
238	Jl. Sintuvu Lr. Black Sweet	0.305	JLS	
239	Jl. Sorofele Lr.	0.150	JLS	
240	Jl. Tadulako II Lr. Tokodikada	0.095	JLS	
241	Jl. Tadulako Lambara Lr	0.202	JLS	
242	Jl. Tandame Lr.	0.188	JLS	
243	Jl. Tandu Lemba Lr.	1.802	JLS	
244	Jl. Tawaeli Pantoloan Lr	0.518	JLS	
245	Jl. Thalua Konchi Lr.	0.321	JLS	
246	Jl. Thalua Konchi Lr. Masjid Syuha	0.167	JLS	
247	Jl. Thalua Konchi Lr. RSJ Madani	0.118	JLS	
248	Jl. Thalua Konchi Lr. VII	0.179	JLS	
249	Jl. Togolele Lr	0.314	JLS	
250	Jl. Tolambu Baiya Lr.	0.771	JLS	

<b>No.</b>	<b>Jalan</b>	<b>Panjang (Km)</b>	<b>Fungsi Hirarki</b>	<b>Keterangan</b>
<b>B</b>	<b>Jalan Kota</b>			
251	Jl. Tope Bau Lr.	0.060	JLS	
252	Jl. Tope Bau Lr. Lamale	0.234	JLS	
253	Jl. Trans Sulawesi Lr. Sat Brimo	0.583	JLS	
254	Jl. Trans Sulawesi Atas Lr.	0.815	JLS	
255	Jl. Trans Sulawesi Lr.	4.240	JLS	
256	Jl. Trans Sulawesi Lr. Menteng	0.319	JLS	
257	Jl. Trans Sulawesi Lr. PT. Rasma M	2.265	JLS	
258	Jl. Uevuku Lr	0.476	JLS	
259	Jl. Vinase Lr	0.075	JLS	
260	Jl. Wiro Lr	0.176	JLS	
261	Jl. Yodo Lr	0.451	JLS	
262	Jl. Abd. Rahman Saleh III Lr.	0.182	JLS	
263	Jl. Abd. Rahman Saleh III Lr. III	0.393	JLS	
264	Jl. Abd. Rahman Saleh Lr.	0.935	JLS	
265	Jl. Abd. Rahman Saleh Lr. Mawar Jingga	0.140	JLS	
266	Jl. Abd. Rahman Saleh Lr. Nike Ardila	0.304	JLS	
267	Jl. Adam Malik Lr.	0.686	JLS	
268	Jl. Air Fast	0.072	JLS	
269	Jl. Angkasa Lr.	2.062	JLS	
270	Jl. Angkasa Lr. 1	0.534	JLS	
271	Jl. Anoa Lr. Lompio	0.400	JLS	
272	Jl. Anoa II Lr.	0.393	JLS	
273	Jl. Anoa II Lr. Ganesha	0.052	JLS	
274	Jl. Anoa II Lr. Harimau	0.111	JLS	
275	Jl. Anoa Lr.	1.034	JLS	
276	Jl. Anoa Lr. Anggrek	0.068	JLS	
277	Jl. Anoa Lr. Damai	0.146	JLS	
278	Jl Anoa Lr. Hari-hati	0.225	JLS	
279	Jl. Anoa Lr. Mawar	0.073	JLS	
280	Jl. Anoa Lr. Pemuda Pancasila	0.841	JLS	
281	Jl. Anoa Lr. Sehati	0.638	JLS	
282	Jl. Anoa Lr. Sensasi	0.507	JLS	

<b>No.</b>	<b>Jalan</b>	<b>Panjang (Km)</b>	<b>Fungsi Hirarki</b>	<b>Keterangan</b>
<b>B</b>	<b>Jalan Kota</b>			
283	Jl. Anoa Lr. Swadaya	0.147	JLS	
284	Jl. Balai Kota Timur Lr.	0.164	JLS	
285	Jl. Balai Kota Timur Lr. I	0.244	JLS	
286	Jl. Bali Lr. I	0.137	JLS	
287	Jl. Bandes Lr.	0.567	JLS	
288	Jl. Bangau Lr.	1.209	JLS	
289	Jl. Banteng Lr.	4.394	JLS	
290	Jl. Basuki Rahmat I Lr. Menara	0.130	JLS	
291	Jl. Basuki Rahmat I Lr. Menara II	0.111	JLS	
292	Jl. Basuki Rahmat I Lr. Posarara	0.119	JLS	
293	Jl. Basuki Rahmat I Lr. Posarara II	0.145	JLS	
294	Jl. Basuki Rahmat I Lr. Posarara III	0.221	JLS	
295	Jl. Basuki Rahmat Lr.	0.915	JLS	
296	Jl. Basuki Rahmat Lr. Anatapura	0.424	JLS	
297	Jl. Basuki Rahmat Lr. Angsana	0.351	JLS	
298	Jl. Basuki Rahmat Lr. Basa Basi	0.838	JLS	
299	Jl. Basuki Rahmat Lr. Fox I	0.194	JLS	
300	Jl. Basuki Rahmat Lr. III R	0.071	JLS	
301	Jl. Basuki Rahmat Lr. Ningrat	0.077	JLS	
302	Jl. Basuki Rahmat Lr. Nusantara	0.334	JLS	
303	Jl. Basuki Rahmat Lr. Pahlawan	0.311	JLS	
304	Jl. Basuki Rahmat Lr. Saleko I	0.590	JLS	
305	Jl. Basuki Rahmat Lr. Selektif	0.149	JLS	
306	Jl. Basuki Rahmat Lr. Toidjia	0.090	JLS	
307	Jl. Batu Bata Indah I Lr	0.704	JLS	
308	Jl. Batu Bata Indah Lr.	0.094	JLS	

<b>No.</b>	<b>Jalan</b>	<b>Panjang (Km)</b>	<b>Fungsi Hirarki</b>	<b>Keterangan</b>
<b>B</b>	<b>Jalan Kota</b>			
309	Jl. Batu Bata Indah Lr. I	0.095	JLS	
310	Jl. Batu Bata Indah Lr. II	0.148	JLS	
311	Jl. Batu Bata Indah Lr. Pusaka	0.089	JLS	
312	Jl. Batu Merah Indah Lr. Kabelora	0.175	JLS	
313	Jl. Beo Lr.	0.551	JLS	
314	Jl. Bone Lr.	0.238	JLS	
315	Jl. Bulili Lr. II	0.284	JLS	
316	Jl. Bulili Lr. III	0.258	JLS	
317	Jl. Bulili Lr. IV	0.197	JLS	
318	Jl. Bulu Masomba I Lr.	3.824	JLS	
319	Jl. Bulu Masomba I Lr. Pasar	0.117	JLS	
320	Jl. Bulu Masomba II Lr. Copet	0.139	JLS	
321	Jl. Bulu Masomba II Lr. Neben	0.065	JLS	
322	Jl. Bulu Masomba Lr. I	0.139	JLS	
323	Jl. Bulu Masomba Lr. II	0.237	JLS	
324	Jl. Bulumasomba Lr.	1.053	JLS	
325	Jl. Burung Walet	0.524	JLS	
326	Jl. Burung Walet Lr.	1.438	JLS	
327	Jl. Buvu Bionga Lr.	0.228	JLS	
328	Jl. Cendrawasih Lr.	0.433	JLS	
329	Jl. Cendrawasih Lr. Censer I	0.377	JLS	
330	Jl. Cendrawasih Lr. Censer II	0.229	JLS	
331	Jl. Cendrawasih Setapak	0.249	JLS	
332	Jl. Citilink	0.079	JLS	
333	Jl. Dewi Sartika II Lr.	0.686	JLS	
334	Jl. Dewi Sartika II Lr. Jembolan	0.124	JLS	
335	Jl. Dewi Sartika II Lr. Tomalanggai	0.237	JLS	
336	Jl. Dewi Sartika III Lr.	0.147	JLS	
337	Jl. Dewi Sartika Lr	1.733	JLS	
338	Jl. Dewi Sartika Lr. I	0.257	JLS	
339	Jl. Dewi Sartika Lr. II	0.202	JLS	

<b>No.</b>	<b>Jalan</b>	<b>Panjang (Km)</b>	<b>Fungsi Hirarki</b>	<b>Keterangan</b>
<b>B</b>	<b>Jalan Kota</b>			
340	Jl. Dewi Sartika Lr. III	0.124	JLS	
341	Jl. Dewi Sartika Lr. IV	0.427	JLS	
342	Jl. Dewi Sartika Lr. Kenangan	1.152	JLS	
343	Jl. Dewi Sartika Lr. Mandiri	0.088	JLS	
344	Jl. Dewi Sartika Lr. Tabaro	0.108	JLS	
345	Jl. Dharma Putra Lr .	0.382	JLS	
346	Jl. Dirgantara Lr.	0.065	JLS	
347	Jl. Elang Lr.	0.250	JLS	
348	Jl. Emmy Saelan Lr.	0.085	JLS	
349	Jl. Emmy Saelan Lr. Darussalam	0.334	JLS	
350	Jl. Garuda I Lr.	0.153	JLS	
351	Jl. Garuda Lr.	2.903	JLS	
352	Jl. Garuda Lr. Gatari	0.381	JLS	
353	Jl. Garuda Lr. II	0.173	JLS	
354	Jl. Garuda Lr. III	0.195	JLS	
355	Jl. Garuda Lr. IV	0.248	JLS	
356	Jl. Garuda Lr. V	0.139	JLS	
357	Jl. Garuda Setapak	0.187	JLS	
358	Jl. Gelatik Lr.	0.439	JLS	
359	Jl. Gelatik Lr. II	0.227	JLS	
360	Jl. Gereja Lr.	0.114	JLS	
361	Jl. Gunung Loli Lr .	0.148	JLS	
362	Jl. Gunung Loli Lr. Cuwek	0.140	JLS	
363	Jl. Gunung Lolo Lr. Tomodila	0.450	JLS	
364	Jl. Gunung Lolo Lr.	0.550	JLS	
365	Jl. Gunung Sidole Lr. I	0.324	JLS	
366	Jl. H. Juanda Lr. I	0.349	JLS	
367	Jl. H. Juanda lr. II	0.270	JLS	
368	Jl. I Gusti Ngurah Rai I Lr. Hamka Jaya	0.366	JLS	
369	Jl. I Gusti Ngurah Rai Lr.	1.382	JLS	
370	Jl. I Gusti Ngurah Rai Lr. Bali	0.125	JLS	
371	Jl. I Gusti Ngurah Rai Lr. Kancil Raya	0.330	JLS	
372	Jl. I Gusti Ngurah Rai Lr.	0.055	JLS	

No.	Jalan	Panjang (Km)	Fungsi Hirarki	Keterangan
<b>B</b>	<b>Jalan Kota</b>			
	Toposakaempa			
373	Jl. Jati Super Lr.	0.158	JLS	
374	Jl. Kadia Lr.	0.526	JLS	
375	Jl. Kakatua Lr. Ampera	0.130	JLS	
376	Jl. Kakatua Lr. II	0.104	JLS	
377	Jl. Kakatua Lr. III	0.415	JLS	
378	Jl. Kakatua Lr. X	0.255	JLS	
379	Jl. Kancil Lr.	1.013	JLS	
380	Jl. Karaja Lemba Lr.	1.550	JLS	
381	Jl. Karaja Lemba Lr. Beluntas	0.374	JLS	
382	Jl. Karaja Lemba Lr. Idaman	0.099	JLS	
383	Jl. Karaja Lemba Lr. Permata Hijau	0.090	JLS	
384	Jl. Kasuari Lr.	0.864	JLS	
385	Jl. Kebun Sari Lr.	1.599	JLS	
386	Jl. Kesadaran Lr	0.536	JLS	
387	Jl. Kesehatan Lr.	0.277	JLS	
388	Jl. Kijang I Selatan	0.185	JLS	
389	Jl. Kijang I Utara	0.195	JLS	
390	Jl. Kijang II Selatan	0.186	JLS	
391	Jl. Kijang III Utara	0.494	JLS	
392	Jl. Kijang Utara Lr.	0.363	JLS	
393	Jl. Kijang Utara VII Lr.	0.327	JLS	
394	Jl. Kijang Utara VII Lr. Malioboro	0.194	JLS	
395	Jl. Kijang Utara VIII Lr. Malioboro	0.096	JLS	
396	Jl. Komp. BTN Palupi	12.298	JLS	
397	Jl. Komp. BTN Petobo	2.930	JLS	
398	Jl. Komp. BTN Puskud	4.479	JLS	
399	Jl. Komp. BTN Tinggede	0.649	JLS	
400	Jl. Komp. Bumi Anggur	4.845	JLS	
401	Jl. Komp. Maesa	1.841	JLS	
402	Jl. Komp. Metro Palu	1.095	JLS	
403	Jl. Komp. Pasar Petobo	0.365	JLS	
404	Jl. Komp. Pengawu Indah	2.609	JLS	
405	Jl. Komp. Pengawu Permai	4.804	JLS	
406	Jl. Komp. Perumahan	1.528	JLS	

<b>No.</b>	<b>Jalan</b>	<b>Panjang (Km)</b>	<b>Fungsi Hirarki</b>	<b>Keterangan</b>
<b>B</b>	<b>Jalan Kota</b>			
	Permata Garuda			
407	Jl. Komp. Perumahan Tinggede	0.758	JLS	
408	Jl. Komp. Perumahan Transmigran	0.784	JLS	
409	Jl. Komp. Sawerigading	0.452	JLS	
410	Jl. Komp. Tavanjuka	3.038	JLS	
411	Jl. Kompl. BTN Pertiwi	0.756	JLS	
412	Jl. Lagarutu Lr.	0.587	JLS	
413	Jl. Lagarutu Lr. Damai	0.116	JLS	
414	Jl. Lagarutu Lr. Marannu	0.187	JLS	
415	Jl. Lagarutu Lr. Torulemba	0.172	JLS	
416	Jl. Lekatu Lr	1.782	JLS	
417	Jl. Lembu Lr. Brekele	0.101	JLS	
418	Jl. Lembu Lr. Kasirampuan	0.069	JLS	
419	Jl. Lr. Uwentumbu Tatura	0.112	JLS	
420	Jl. Malaya Lr.	2.241	JLS	
421	Jl. Maleo Lr. Bumi Bakti	0.468	JLS	
422	Jl. Maleo Lr. Camar	0.114	JLS	
423	Jl. Maleo Lr. I	0.159	JLS	
424	Jl. Maleo Lr. II	0.313	JLS	
425	Jl. Maleo Lr. IX	0.052	JLS	
426	Jl. Maleo Lr. P4	0.079	JLS	
427	Jl. Maleo Lr. Sawerigading	0.321	JLS	
428	Jl. Maleo Lr. Vengga	0.378	JLS	
429	Jl. Maleo Lr. VII	0.246	JLS	
430	Jl. Maleo Lr. VIII	0.273	JLS	
431	Jl. Maleo Permai I	0.536	JLS	
432	Jl. Maleo Permai Lr.	0.459	JLS	
433	Jl. Malontara II	0.203	JLS	
434	Jl. Malontara III	0.285	JLS	
435	Jl. Malontara Lr.	0.256	JLS	
436	Jl. Malontara Lrg Benalu Batu	0.141	JLS	
437	Jl. Maluku Lr.	0.653	JLS	
438	Jl. Mamara Lr.	6.694	JLS	
439	Jl. Mandala	0.249	JLS	
440	Jl. Manunggal Lr.	0.293	JLS	
441	Jl. Masjid Raya Lr. Tinoor	0.179	JLS	

<b>No.</b>	<b>Jalan</b>	<b>Panjang (Km)</b>	<b>Fungsi Hirarki</b>	<b>Keterangan</b>
<b>B</b>	<b>Jalan Kota</b>			
442	Jl. Mawar Lr.	0.129	JLS	
443	Jl. Meranti Lr. I	0.126	JLS	
444	Jl. Meranti Lr. II	0.063	JLS	
445	Jl. Merpati Lr	0.672	JLS	
446	Jl. Merpati Lr. II	1.135	JLS	
447	Jl. Merpati Lr. Merpati I	0.155	JLS	
448	Jl. Merpati Lr. Merpati III	0.840	JLS	
449	Jl. Merpati Lr. Merpati Putih	0.246	JLS	
450	Jl. Merpati Lr. Merpati Putih I	0.091	JLS	
451	Jl. Miangas Lr.	0.532	JLS	
452	Jl. Miangas Setapak	0.895	JLS	
453	Jl. Muhere II Lr.	0.102	JLS	
454	Jl. Mutiara Lr.	0.106	JLS	
455	Jl. Mutiara Lr. IV	0.529	JLS	
456	Jl. Mutiara Lr. V	0.148	JLS	
457	Jl. Nokilalaki Lr.	0.190	JLS	
458	Jl. Nunumbuku Lr	3.499	JLS	
459	Jl. Patimura Lr	0.464	JLS	
460	Jl. Patimura Lr. VI	0.244	JLS	
461	Jl. Pengawu Lr. Ginseng	0.145	JLS	
462	Jl. Pengawu Lrg Jahe	0.071	JLS	
463	Jl. Pengawu Lrg Kalosi	0.100	JLS	
464	Jl. Pengawu Lrg Kumis Kucing	0.064	JLS	
465	Jl. Pengawu Lrg Mayana	0.066	JLS	
466	Jl. Pengawu Lrg Mengkudu	0.135	JLS	
467	Jl. Pengawu Lrg Sambiloto	0.065	JLS	
468	Jl. Pipit Lr. Pipit I	0.362	JLS	
469	Jl. Pipit Lr. Pipit II	0.297	JLS	
470	Jl. PU Lr. (samping PU Pengairan)	0.279	JLS	
471	Jl. Purnawirawan II Lr.	0.117	JLS	
472	Jl. Purnawirawan Lr.	0.123	JLS	
473	Jl. R.A Kartini Lr. Salibo	0.334	JLS	
474	Jl. Rajawali Lr. I	0.366	JLS	
475	Jl. Rajawali Lr. II	0.100	JLS	
476	Jl. Ramba Lr.	0.804	JLS	
477	Jl. Ramba Lr. II	0.152	JLS	

<b>No.</b>	<b>Jalan</b>	<b>Panjang (Km)</b>	<b>Fungsi Hirarki</b>	<b>Keterangan</b>
<b>B</b>	<b>Jalan Kota</b>			
478	Jl. Saleko II Lr.	0.255	JLS	
479	Jl. Sekunder II Lr.	0.454	JLS	
480	Jl. Sekunder Lr.	0.254	JLS	
481	Jl. Simpati Lr.	0.632	JLS	
482	Jl. Sulawesi Lr. I	0.216	JLS	
483	Jl. Sulawesi Lr. II	0.172	JLS	
484	Jl. Sulawesi Lr. PLN	0.421	JLS	
485	Jl. Sultan Allauddin Lr.	1.226	JLS	
486	Jl. Swadaya Lr.	0.065	JLS	
487	Jl. Swadaya Lr. Sawerigading	0.263	JLS	
488	Jl. Tadulako II Lr	0.391	JLS	
489	Jl. Tanggul Mas Lr.	4.554	JLS	
490	Jl. Tanggul Selatan Lr.	4.395	JLS	
491	Jl. Tanggul Sungai Palu	4.864	JLS	
492	Jl. Tanggul Utara Lr.	0.273	JLS	
493	Jl. Tangkasi Lr.	0.900	JLS	
494	Jl. Tanjung Angin I Lr.	0.261	JLS	
495	Jl. Tanjung Angin Lr.	0.129	JLS	
496	Jl. Tanjung Angin Lr. I	0.131	JLS	
497	Jl. Tanjung Angin Lr. II	0.086	JLS	
498	Jl. Tanjung Angin Lr. III	0.071	JLS	
499	Jl. Tanjung Dako Lr. Pasaraka	0.510	JLS	
500	Jl. Tanjung Harapan I Lr.	0.645	JLS	
501	Jl. Tanjung Harapan Lr.	0.365	JLS	
502	Jl. Tanjung Harapan Lr. III	0.067	JLS	
503	Jl. Tanjung Karang Lr. I	0.134	JLS	
504	Jl. Tanjung Karang Lr. II	0.242	JLS	
505	Jl. Tanjung Karang Lr. Rama	0.106	JLS	
506	Jl. Tanjung Manimbaya Lr.	0.462	JLS	
507	Jl. Tanjung Manimbaya Lr. Damai	0.119	JLS	
508	Jl. Tanjung Manimbaya Lr. Masjid Umar Bin	0.215	JLS	
509	Jl. Tanjung Manimbaya Lr. Melati	0.229	JLS	
510	Jl. Tanjung Manimbaya Lr. Walet	0.087	JLS	

<b>No.</b>	<b>Jalan</b>	<b>Panjang (Km)</b>	<b>Fungsi Hirarki</b>	<b>Keterangan</b>
<b>B</b>	<b>Jalan Kota</b>			
511	Jl. Tanjung Santigi Lr.	0.273	JLS	
512	Jl. Tanjung Satu Lr. Bina Baru	0.147	JLS	
513	Jl. Tanjung Satu Lr. Cinta	0.183	JLS	
514	Jl. Tanjung Satu Lr. Citra	0.114	JLS	
515	Jl. Tanjung Satu Lr. I	0.117	JLS	
516	Jl. Tanjung Satu Lr. II	0.115	JLS	
517	Jl. Tanjung Satu Lr. III	0.118	JLS	
518	Jl. Tanjung Satu Lr. Lestari	0.193	JLS	
519	Jl. Tanjung Satu Lr. Masjid Darul Hamk	0.110	JLS	
520	Jl. Tanjung Satu Lr. Pratama	0.242	JLS	
521	Jl. Tanjung Tada Lr. I	0.194	JLS	
522	Jl. Tanjung Tururuka Lr.	0.176	JLS	
523	Jl. Tanjung Tururuka Lr. Bima	0.072	JLS	
524	Jl. Tavanjuka Indah	0.086	JLS	
525	Jl. Tavanjuka Lr	0.058	JLS	
526	Jl. Tavanjuka Permai	0.150	JLS	
527	Jl. Tekukur Lr.	0.170	JLS	
528	Jl. Towua I Lr.	0.162	JLS	
529	Jl. Towua I Lr. I	0.163	JLS	
530	Jl. Towua I Lr. Sangrapuan	0.329	JLS	
531	Jl. Towua II Lr. I	0.144	JLS	
532	Jl. Towua II Lr. II	0.103	JLS	
533	Jl. Towua II Lr. III	0.081	JLS	
534	Jl. Towua II Lr. IV	0.071	JLS	
535	Jl. Towua II Lr. VI	0.111	JLS	
536	Jl. Towua II Lr. VII	0.063	JLS	
537	Jl. Towua Lr I	0.085	JLS	
538	Jl. Towua Lr.	0.735	JLS	
539	Jl. Towua Lr. Seni Rupa	0.336	JLS	
540	Jl. Towua Lr. Sentuwu	0.117	JLS	
541	Jl. Towua Lr. Sumber Rezeki	0.332	JLS	
542	Jl. TPA Kawatuna Lr.	0.740	JLS	
543	Jl. Tupai Lr.	0.393	JLS	
544	Jl. Veteran IV	0.349	JLS	

<b>No.</b>	<b>Jalan</b>	<b>Panjang (Km)</b>	<b>Fungsi Hirarki</b>	<b>Keterangan</b>
<b>B</b>	<b>Jalan Kota</b>			
545	Jl. Veteran Lr. I	0.378	JLS	
546	Jl. Veteran Lr. III	0.121	JLS	
547	Jl. Veteran Lr. IV	0.155	JLS	
548	Jl. Veteran Lr. Karlota	0.098	JLS	
549	Jl. Veteran Lr. Moras	0.176	JLS	
550	Jl. Veteran Lr. SMPN 7	0.167	JLS	
551	Jl. Veteran Lr. V	0.446	JLS	
552	Jl. Veteran VI Lr. I	0.468	JLS	
553	Jl. Woodward I	0.191	JLS	
554	Jl. Woodward Lr.	0.429	JLS	
555	Jl. Woodward Lr. Bali III	0.600	JLS	
556	Jl. Zebra I. A	0.945	JLS	
557	Jl. Zebra I. A Lr	0.203	JLS	
558	Jl. Zebra II Lr.	0.161	JLS	
559	Jl. Zebra III Lr.	0.049	JLS	
560	Jl. Zebra IV Lr.	0.327	JLS	
561	Jl. Zebra Lr.	0.491	JLS	
562	Jl. Zebra VI Lr.	0.296	JLS	
563	Jl. A. Yani Lr. III	0.254	JLS	
564	Jl. A. Yani Lr. IV	0.262	JLS	
565	Jl. Antropologi Lr. I	0.112	JLS	
566	Jl. Bukit Jabal Rahma Lr. I	0.523	JLS	
567	Jl. Bukit Jabal Rahma Lr. II	0.385	JLS	
568	Jl. Bukit Jabal Rahma Lr. III	0.416	JLS	
569	Jl. Bukit Jabal Rahma Lr. IV	0.319	JLS	
570	Jl. Bukit Jabal Rahmah Lr. IV	0.122	JLS	
571	Jl. Bukit Sova Lr.	0.101	JLS	
572	Jl. Cut Mutia Lr. I	0.388	JLS	
573	Jl. Dayo Dara Lr. I	0.208	JLS	
574	Jl. Dayo Dara Lr. II	0.096	JLS	
575	Jl. Dayodara Lr.	0.172	JLS	
576	Jl. Domba Lr. Gelora Abadi	0.094	JLS	
577	Jl. Domba Lr. I	0.092	JLS	
578	Jl. Domba Lr. II	0.131	JLS	
579	Jl. Domba Lr. Melati	0.165	JLS	
580	Jl. Dr. Soeharso Lr. Polda	0.391	JLS	

<b>No.</b>	<b>Jalan</b>	<b>Panjang (Km)</b>	<b>Fungsi Hirarki</b>	<b>Keterangan</b>
<b>B</b>	<b>Jalan Kota</b>			
581	Jl. Dr. Wahidin Lr	0.801	JLS	
582	Jl. Fisika	0.934	JLS	
583	Fisika Lr. 1	0.265	JLS	
584	Fisika Lr. 2	0.167	JLS	
585	Gedung Olahraga	0.092	JLS	
586	Gunung Tinombala III	0.168	JLS	
587	Gunung Tinombala Lr. Ikan Mas	0.317	JLS	
588	Hang Tuah I Lr.	0.151	JLS	
589	Hang Tuah Lr.	0.141	JLS	
590	Hang Tuah Lr. Senyum	0.144	JLS	
591	Hayam Wuruk Lr.	0.218	JLS	
592	Hortikultura	0.731	JLS	
593	Kalantaro Lr. I	0.371	JLS	
594	Kalantaro Lr. II	0.113	JLS	
595	Kampung Nelayan Lr.	0.404	JLS	
596	Kayu Nunu Lr. I	0.072	JLS	
597	Ketapang	0.466	JLS	
598	Kihajar Dewantara II	0.112	JLS	
599	Kihajar Dewantara Lr.	0.354	JLS	
600	Kihajar Dewantara Lr. Canser	0.099	JLS	
601	Kihajar Dewantara Lr. Finolia	0.091	JLS	
602	Kimaja Lr. Bakso I	0.136	JLS	
603	Kimaja Lr. Bakso II	0.080	JLS	
604	Komp. BTN Korpri Roviga	5.000	JLS	
605	Komp. Bumi Talise Indah	5.218	JLS	
606	Komp. DPD KNPI Sul-Teng	0.190	JLS	
607	Komp. Lasoani Atas	1.528	JLS	
608	Komp. Lik Roviga	0.568	JLS	
609	Komp. Lokalisasi Tondo	1.082	JLS	
610	Komp. Pameran	3.000	JLS	
611	Komp. Perumahan Layana Sosial	1.946	JLS	
612	Komp. Perumahan Dosen UNTAD	2.786	JLS	
613	Komp. Perumahan Layana Indah	3.970	JLS	
614	Komp. Perumahan	1.551	JLS	

<b>No.</b>	<b>Jalan</b>	<b>Panjang (Km)</b>	<b>Fungsi Hirarki</b>	<b>Keterangan</b>
<b>B</b>	<b>Jalan Kota</b>			
	Nokilalaki			
615	Komp. Pesantren Nurul Falah	0.419	JLS	
616	Komp. Teluk Palu	2.094	JLS	
617	KS. Tubun	0.184	JLS	
618	LIK Layana Indah Lr. I	0.254	JLS	
619	LIK Layana Indah Lr. II	0.277	JLS	
620	LIK Layana Indah Lr. III	0.107	JLS	
621	Macan Lr. Istana	0.149	JLS	
622	Mangunsarkoro I	0.282	JLS	
623	Mangunsarkoro I Lr.	0.076	JLS	
624	Mangunsarkoro II	0.346	JLS	
625	Mangunsarkoro II Lr.	0.101	JLS	
626	Mantikulore Lr. I	0.115	JLS	
627	Melati Lr.	0.192	JLS	
628	Merdeka Lr	0.621	JLS	
629	Merdeka Lr. I	0.190	JLS	
630	Merdeka Lr. IV	0.324	JLS	
631	MH. Thamrin Lr. I	0.047	JLS	
632	MH. Thamrin Lr. II	0.055	JLS	
633	Otista IV Lr.	0.139	JLS	
634	Otista Lr. I	0.202	JLS	
635	Otista Lr. III	0.079	JLS	
636	Otista Lr. Kumbara	0.179	JLS	
637	Otista Lr. Lestari	0.197	JLS	
638	Otista Lr. Otista Nauli	0.086	JLS	
639	Panglima Polim Lr. II	0.178	JLS	
640	Pendidikan Lr.	0.072	JLS	
641	Pramuka Lrg	0.061	JLS	
642	Pueyuse Lr	0.070	JLS	
643	Pueyuse Lr. III	0.696	JLS	
644	Puro Lr.	0.452	JLS	
645	Raden Saleh Lr.	0.077	JLS	
646	Raja Moili Lr.	0.267	JLS	
647	Roviga Lr.	0.960	JLS	
648	S. Parman II	0.261	JLS	
649	S. Parman Lr	0.108	JLS	
650	S. Parman Lr. Bhakti	0.163	JLS	
651	Sam Ratulangi Lr. Capista	0.231	JLS	

<b>No.</b>	<b>Jalan</b>	<b>Panjang (Km)</b>	<b>Fungsi Hirarki</b>	<b>Keterangan</b>
<b>B</b>	<b>Jalan Kota</b>			
652	Sam Ratulangi Lr. III	0.222	JLS	
653	Sam Ratulangi Lr. IV	0.182	JLS	
654	Sam Ratulangi Lr. Perdagangan	0.432	JLS	
655	Sam Ratulangi Lr. V	0.268	JLS	
656	Sambalangi Panda Lr.	0.829	JLS	
657	Sengon Raya Lr.	0.404	JLS	
658	Setia Budi I	0.127	JLS	
659	Setia Budi Lr. Delima	0.165	JLS	
660	Setia Budi Lr. Delima 1	0.183	JLS	
661	Setia Budi Lr. I	0.093	JLS	
662	Setia Budi Lr. II	0.091	JLS	
663	Setia Budi Lr. III	0.194	JLS	
664	Setia Budi Lr. Siswa	0.182	JLS	
665	Simaraja Lr. Komp Jawa	0.390	JLS	
666	Simaraja Lr. Virgo	0.178	JLS	
667	Sisingamaraja Lr Sintuwu	0.428	JLS	
668	Sisingamaraja Lr.	0.609	JLS	
669	Sisingamaraja Lr. I	0.215	JLS	
670	Sisingamaraja Lr. Sintuvu	0.151	JLS	
671	Sisingamaraja Lr. Komp Jawa	0.390	JLS	
672	Sisingamaraja Lr. Virgo	0.178	JLS	
673	Slamet Riyadi Lr.	0.233	JLS	
674	Slamet Riyadi Lr. II	0.175	JLS	
675	Soekarno - Hatta Lr.	3.342	JLS	
676	Soeprapto Lr	0.361	JLS	
677	Soeprapto Lr. SMA	0.217	JLS	
678	Sutoyo II	0.124	JLS	
679	Tadulako Lr.	0.093	JLS	
680	Teknika	0.774	JLS	
681	Tolamunte Lr. Setapak	0.366	JLS	
682	Tombolotutu Lr. Ayu	0.293	JLS	
683	Tombolotutu Lr. Delima	0.270	JLS	
684	Tombolotutu Lr. I	0.079	JLS	
685	Tombolotutu Lr. IV	0.214	JLS	
686	Tombolotutu Lr. Pueyuse I	0.094	JLS	
687	Tombolotutu Lr.4	0.155	JLS	

No.	Jalan	Panjang (Km)	Fungsi Hirarki	Keterangan
<b>B</b>				
<b>Jalan Kota</b>				
688	Trans DUPA Lr.	0.406	JLS	
689	Trans LIK DUPA - Indah Lr.	0.734	JLS	
690	Untad I Lr.	0.452	JLS	
691	Urip Sumoharjo Lr. II UPS	0.122	JLS	
692	Urip Sumoharjo Lr. Manggerante	0.078	JLS	
693	Uwe Borro Lr.	0.317	JLS	
694	Uwe Borro Lr. I	0.177	JLS	
695	Uwe Goda	0.334	JLS	
696	Uwe Goda Lr.	0.294	JLS	
697	Uwe Goda I Lr.	0.311	JLS	
698	Uwe Mpoguru Lr. I	0.032	JLS	
699	Uwe Mpoguru Lr. II	0.042	JLS	
700	Uwe Salura Lr I	0.159	JLS	
701	Uwe Salura Lr.	0.120	JLS	
702	W. Monginsidi Lr	0.298	JLS	
703	Yojokodi Lr. Canggih	0.189	JLS	
704	Yojokoji Lr.	0.043	JLS	
705	Yos Sudarso Lr. I	0.264	JLS	
706	Yos Sudarso Lr. II	0.137	JLS	
707	Yos Sudarso Lr. Mangga	0.704	JLS	
708	Yos Sudarso Tembus Jl. Hangtuh	0.064	JLS	
<b>Total</b>		<b>351.098</b>		

d. Jaringan Jalan Lingkar Sekunder

Jalan Lingkungan Sekunder terdiri dari 642 Ruas jalan dengan total panjang 387.208 km.

**Tabel 3.6**

Rencana Jaringan Jalan Kota Fungsi Jalan Lingkungan Sekunder Kota Palu

No.	Jalan	Panjang (Km)	Fungsi Hirarki	Keterangan
<b>C</b>				
<b>Jalan Kota</b>				
1	Jl. Angsana V	0.045	Jling-S	

<b>No.</b>	<b>Jalan</b>	<b>Panjang (Km)</b>	<b>Fungsi Hirarki</b>	<b>Keterangan</b>
<b>C</b>	<b>Jalan Kota</b>			
2	Jl. Seroja I	0.050	Jling-S	
3	Jl. Angsana I	0.065	Jling-S	
4	Jl. Angsana VI	0.068	Jling-S	
5	Jl. Kijang V Utara	0.070	Jling-S	
6	Jl. Seruni II	0.077	Jling-S	
7	Jl. Cemara III	0.078	Jling-S	
8	Jl. Kijang Utara IX Lr.	0.081	Jling-S	
9	Jl. Kijang VIIB	0.081	Jling-S	
10	Jl. Kuburan Kramat	0.081	Jling-S	
11	Jl. Cantik	0.081	Jling-S	
12	Jl. Karaja Lemba IX	0.084	Jling-S	
13	Jl. Angsana II	0.084	Jling-S	
14	Jl. Pramugari IV	0.084	Jling-S	
15	Jl. Karaja Lemba X	0.085	Jling-S	
16	Jl. Angsana III	0.087	Jling-S	
17	Jl. Angsana IV	0.091	Jling-S	
18	Jl. Pue Salanga	0.094	Jling-S	
19	Jl. Ganogo III	0.097	Jling-S	
20	Jl. Nusantara	0.100	Jling-S	
21	Jl. Anyelir	0.102	Jling-S	
22	Jl. Loinang	0.103	Jling-S	
23	Jl. Seruni I	0.104	Jling-S	
24	Jl. Tolia	0.104	Jling-S	
25	Jl. Lagarutu I	0.104	Jling-S	
26	Jl. Nusantara I	0.105	Jling-S	
27	Jl. Nusantara II	0.105	Jling-S	
28	Jl. Boya Perumba	0.106	Jling-S	
29	Jl. Komodo I	0.110	Jling-S	
30	Jl. Sis Al Jufri IV	0.111	Jling-S	
31	Jl. Ketimun I	0.111	Jling-S	
32	Jl. Pulau Samosir	0.113	Jling-S	
33	Jl. Kelapa Gading II	0.115	Jling-S	
34	Jl. Landato	0.119	Jling-S	
35	Jl. Tanjung Manimbaya V	0.119	Jling-S	
36	Jl. Pramugari III	0.121	Jling-S	
37	Jl. Sedap Malam	0.122	Jling-S	
38	Jl. Tinede	0.123	Jling-S	

<b>No.</b>	<b>Jalan</b>	<b>Panjang (Km)</b>	<b>Fungsi Hirarki</b>	<b>Keterangan</b>
<b>C</b>	<b>Jalan Kota</b>			
39	Jl. Yaruna	0.125	Jling-S	
40	Jl. Kalantaro II	0.126	Jling-S	
41	Jl. Kijang VI Selatan	0.128	Jling-S	
42	Jl. Tuparante	0.128	Jling-S	
43	Jl. Sumur Yoga	0.129	Jling-S	
44	Jl. Kijang IV Selatan	0.129	Jling-S	
45	Jl. Kijang IX Selatan	0.131	Jling-S	
46	Jl. Sakura	0.132	Jling-S	
47	Jl. Suflier	0.132	Jling-S	
48	Jl. Tanjung	0.132	Jling-S	
49	Jl. Dodorovulu	0.132	Jling-S	
50	Jl. Kijang III Selatan	0.132	Jling-S	
51	Jl. Torayako	0.134	Jling-S	
52	Jl. Purnawirawan I	0.135	Jling-S	
53	Jl. Cemara VI	0.136	Jling-S	
54	Jl. Nusantara III	0.136	Jling-S	
55	Jl. Angsana Raya	0.138	Jling-S	
56	Jl. Kasarami	0.140	Jling-S	
57	Jl. Tanjung Tururuka III	0.140	Jling-S	
58	Jl. Tagari	0.141	Jling-S	
59	Jl. Katombo	0.142	Jling-S	
60	Jl. Vatuvuri	0.143	Jling-S	
61	Jl. Mall Tatura	0.145	Jling-S	
62	Jl. Cemara IV	0.146	Jling-S	
63	Jl. Vatumangumpi	0.146	Jling-S	
64	Jl. Cemara V	0.148	Jling-S	
65	Jl. Kijang Utara	0.148	Jling-S	
66	Jl. Dharma Putra III	0.148	Jling-S	
67	Jl. Watunonju 2	0.150	Jling-S	
68	Jl. Sungai Lambangan III	0.151	Jling-S	
69	Jl. Kijang Utara Lr.	0.151	Jling-S	
70	Jl. Kubur	0.152	Jling-S	
71	Jl. Kijang Utara IX	0.153	Jling-S	
72	Jl. Cendana II	0.153	Jling-S	
73	Jl. Mataka	0.154	Jling-S	
74	Jl. Sapta Marga IV	0.154	Jling-S	
75	Jl. Galara	0.156	Jling-S	

<b>No.</b>	<b>Jalan</b>	<b>Panjang (Km)</b>	<b>Fungsi Hirarki</b>	<b>Keterangan</b>
<b>C</b>	<b>Jalan Kota</b>			
76	Jl. Tanjung Tururuka IV	0.158	Jling-S	
77	Jl. Melati Raya	0.160	Jling-S	
78	Jl. Sport Center	0.160	Jling-S	
79	Jl. Lasitumua	0.161	Jling-S	
80	Jl. Arajana	0.163	Jling-S	
81	Jl. Narisi	0.163	Jling-S	
82	Jl. Ganogo II	0.164	Jling-S	
83	Jl. Sungai Lambangan	0.164	Jling-S	
84	Jl. Kenari	0.164	Jling-S	
85	Jl. Lamotu	0.167	Jling-S	
86	Jl. Kerukunan II	0.167	Jling-S	
87	Jl. Ganogo I	0.168	Jling-S	
88	Jl. Sungai Kinore	0.169	Jling-S	
89	Jl. Karaja Lemba III	0.171	Jling-S	
90	Jl. Agatis IV	0.172	Jling-S	
91	Jl. Sis Al Jufri III	0.173	Jling-S	
92	Jl. Boya Binangga	0.174	Jling-S	
93	Jl. Sungai Wuno	0.176	Jling-S	
94	Jl. Cemara II	0.177	Jling-S	
95	Jl. Kijang Selatan VII	0.177	Jling-S	
96	Jl. Merdeka II	0.177	Jling-S	
97	Jl. Agatis III	0.178	Jling-S	
98	Jl. Kijang VIIA Selatan	0.178	Jling-S	
99	Jl. Watunonju 1	0.178	Jling-S	
100	Jl. Kijang VII A	0.179	Jling-S	
101	Jl. Bingge	0.180	Jling-S	
102	Jl. A. Yani II	0.180	Jling-S	
103	Jl. Analisis	0.182	Jling-S	
104	Jl. Undata I	0.182	Jling-S	
105	Jl. Arsitektur	0.183	Jling-S	
106	Jl. Bayangkara	0.183	Jling-S	
107	Jl. Penyiar	0.183	Jling-S	
108	Jl. Pueyuse	0.183	Jling-S	
109	Jl. Cemara VII	0.184	Jling-S	
110	Jl. Muhere II	0.184	Jling-S	
111	Jl. KS. Tubun		Jling-S	

<b>No.</b>	<b>Jalan</b>	<b>Panjang (Km)</b>	<b>Fungsi Hirarki</b>	<b>Keterangan</b>
<b>C</b>	<b>Jalan Kota</b>			
112	Jl. Durian Lr. Durian I	0.185	Jling-S	
113	Jl. Dugi Tugi	0.185	Jling-S	
114	Jl. Kayu Vilo	0.185	Jling-S	
115	Jl. Teluk Tomini I	0.187	Jling-S	
116	Jl. Beruang	0.187	Jling-S	
117	Jl. Sungai Lambangan I	0.188	Jling-S	
118	Jl. Gelora	0.188	Jling-S	
119	Jl. PU Pengairan	0.188	Jling-S	
120	Jl. Cendana I	0.189	Jling-S	
121	Jl. Baraya	0.190	Jling-S	
122	Jl. Hayam Wuruk III	0.190	Jling-S	
123	Jl. Marukalili	0.191	Jling-S	
124	Jl. Tompi	0.193	Jling-S	
125	Jl. Sukun	0.195	Jling-S	
126	Jl. Sungai Balantak	0.196	Jling-S	
127	Jl. Tolambu I	0.196	Jling-S	
128	Jl. Sapta Marga	0.196	Jling-S	
129	Jl. Gunung Silamoro	0.197	Jling-S	
130	Jl. Belibis	0.198	Jling-S	
131	Jl. Gunung Tinombala I	0.199	Jling-S	
132	Jl. Pakora	0.200	Jling-S	
133	Jl. Nenas II	0.203	Jling-S	
134	Jl. Pekuburan Umum	0.205	Jling-S	
135	Jl. Sapta Marga III	0.206	Jling-S	
136	Jl. Bahasa	0.206	Jling-S	
137	Jl. Sapta Marga I	0.207	Jling-S	
138	Jl. Basuki Rahmat II	0.207	Jling-S	
139	Jl. Pasoso	0.207	Jling-S	
140	Jl. Sapta Marga II	0.208	Jling-S	
141	Jl. Pue Lomba	0.208	Jling-S	
142	Jl. Belimbing II	0.209	Jling-S	
143	Jl. Muhere III	0.209	Jling-S	
144	Jl. Sungai Lambangan II	0.210	Jling-S	
145	Jl. Dirgantara	0.210	Jling-S	
146	Jl. Mas Mansyur II	0.211	Jling-S	

<b>No.</b>	<b>Jalan</b>	<b>Panjang (Km)</b>	<b>Fungsi Hirarki</b>	<b>Keterangan</b>
<b>C</b>	<b>Jalan Kota</b>			
147	Jl. Daeng Pawindu	0.212	Jling-S	
148	Jl. Flamboyan	0.212	Jling-S	
149	Jl. Uwe Mpoguru	0.213	Jling-S	
150	Jl. Bakuku II / Lambori	0.215	Jling-S	
151	Jl. Lambori	0.215	Jling-S	
152	Jl. Gemini	0.216	Jling-S	
153	Jl. Mangga II	0.217	Jling-S	
154	Jl. Tanjung Tururuka II	0.217	Jling-S	
155	Jl. Pabisara	0.218	Jling-S	
156	Jl. Logo	0.219	Jling-S	
157	Jl. Pue Sando	0.219	Jling-S	
158	Jl. Datu Mpedagi	0.220	Jling-S	
159	Jl. Seroja	0.221	Jling-S	
160	Jl. Kijang Utara VI	0.221	Jling-S	
161	Jl. Bunto	0.221	Jling-S	
162	Jl. Tadulako Lambara	0.222	Jling-S	
163	Jl. Adiyaksa	0.222	Jling-S	
164	Jl. Aries	0.222	Jling-S	
165	Jl. Dharma Putra II	0.222	Jling-S	
166	Jl. Dharma Putra IV	0.222	Jling-S	
167	Jl. Tanjung Tada	0.223	Jling-S	
168	Jl. Aquarius	0.224	Jling-S	
169	Jl. Sis Al Jufri II	0.225	Jling-S	
170	Jl. Daeng Manesa	0.225	Jling-S	
171	Jl. Lovengawu	0.227	Jling-S	
172	Jl. Durian Lr. Kulit Durian	0.228	Jling-S	
173	Jl. Yanggebodu	0.228	Jling-S	
174	Jl. Sarovele	0.229	Jling-S	
175	Jl. Rorempeluru	0.231	Jling-S	
176	Jl. Tamberante	0.233	Jling-S	
177	Jl. Merpati IV	0.234	Jling-S	
178	Jl. Sungai Malei	0.235	Jling-S	
179	Jl. Bulili I	0.235	Jling-S	
180	Jl. Perjuangan Raya	0.235	Jling-S	
181	Jl. Mardjuni	0.237	Jling-S	

<b>No.</b>	<b>Jalan</b>	<b>Panjang (Km)</b>	<b>Fungsi Hirarki</b>	<b>Keterangan</b>
<b>C</b>	<b>Jalan Kota</b>			
182	Jl. Panglima Polim	0.237	Jling-S	
183	Jl. Lengar	0.238	Jling-S	
184	Jl. Tanjung Api	0.241	Jling-S	
185	Jl. Muhere	0.243	Jling-S	
186	Jl. Al Khaerat	0.243	Jling-S	
187	Jl. I Gusti Ngurah Rai I	0.244	Jling-S	
188	Jl. Labu Lembah	0.247	Jling-S	
189	Jl. Ngoriopolo	0.247	Jling-S	
190	Jl. Datu Kumbili	0.249	Jling-S	
191	Jl. Tope Bau	0.249	Jling-S	
192	Jl. A. Yani I	0.249	Jling-S	
193	Jl. Belimbing	0.250	Jling-S	
194	Jl. Anggur I	0.250	Jling-S	
195	Jl. Lapaturuki	0.250	Jling-S	
196	Jl. Pue Sula	0.251	Jling-S	
197	Jl. Uwe Laurbori	0.251	Jling-S	
198	Jl. Pimpilido	0.252	Jling-S	
199	Jl. Srikaya II	0.254	Jling-S	
200	Jl. Boya Papitu	0.254	Jling-S	
201	Jl. Kijang Utara VII	0.255	Jling-S	
202	Jl. Domba I	0.255	Jling-S	
203	Jl. Tanjung Manimbaya I	0.256	Jling-S	
204	Jl. Tanjung Lambongan	0.256	Jling-S	
205	Jl. Veteran I	0.257	Jling-S	
206	Jl. Uveputa	0.259	Jling-S	
207	Jl. Jati Jaya	0.261	Jling-S	
208	Jl. Basuki Rahmat I	0.262	Jling-S	
209	Jl. Tanjung Ruru	0.263	Jling-S	
210	Jl. Uwe Malariki	0.263	Jling-S	
211	Jl. Kacang Panjang	0.264	Jling-S	
212	Jl. Banteng II	0.265	Jling-S	
213	Jl. Watukanjai	0.265	Jling-S	
214	Jl. Kakatua II	0.266	Jling-S	
215	Jl. Dharma Putra	0.266	Jling-S	
216	Jl. Nusa Indah	0.268	Jling-S	
217	Jl. Bulu Masomba II	0.270	Jling-S	

<b>No.</b>	<b>Jalan</b>	<b>Panjang (Km)</b>	<b>Fungsi Hirarki</b>	<b>Keterangan</b>
<b>C</b>	<b>Jalan Kota</b>			
218	Jl. Mas Mansyur I	0.273	Jling-S	
219	Jl. LIK Roviga II	0.273	Jling-S	
220	Jl. Merpati I	0.274	Jling-S	
221	Jl. Tanjung Silamolo	0.274	Jling-S	
222	Jl. Sis Al Jufri I	0.275	Jling-S	
223	Jl. Macan	0.275	Jling-S	
224	Jl. Pue Nteda	0.276	Jling-S	
225	Jl. Sisinga Mangaraja II	0.276	Jling-S	
226	Jl. Samudra I	0.277	Jling-S	
227	Jl. Garuda I	0.277	Jling-S	
228	Jl. Gunung Bosa	0.277	Jling-S	
229	Jl. Karoya I	0.277	Jling-S	
230	Jl. Vatukasoro	0.278	Jling-S	
231	Jl. Kangguru	0.278	Jling-S	
232	Jl. H. Nahung	0.279	Jling-S	
233	Jl. Bambu	0.280	Jling-S	
234	Jl. Makagili	0.280	Jling-S	
235	Jl. Kayu Nunu	0.280	Jling-S	
236	Jl. Karoya	0.282	Jling-S	
237	Jl. Sungai Nil	0.283	Jling-S	
238	Jl. Moh. Natsir	0.283	Jling-S	
239	Jl. Bale	0.283	Jling-S	
240	Jl. Kelapa Gading	0.285	Jling-S	
241	Jl. Poboya	0.285	Jling-S	
242	Jl. Kemuning	0.286	Jling-S	
243	Jl. Gunung Bale	0.286	Jling-S	
244	Jl. Tanjung Pangimpuan	0.288	Jling-S	
245	Jl. Otista IV	0.289	Jling-S	
246	Jl. Tanjung Pangimpuan I	0.290	Jling-S	
247	Jl. Basokaola	0.290	Jling-S	
248	Jl. Lombok	0.291	Jling-S	
249	Jl. Virgo	0.293	Jling-S	
250	Jl. Sungai Bongka	0.295	Jling-S	
251	Jl. Maleo II	0.295	Jling-S	
252	Jl. Tanjung Malakosa	0.295	Jling-S	
253	Jl. Posirampe	0.295	Jling-S	

<b>No.</b>	<b>Jalan</b>	<b>Panjang (Km)</b>	<b>Fungsi Hirarki</b>	<b>Keterangan</b>
<b>C</b>	<b>Jalan Kota</b>			
254	Jl. Siranindi	0.297	Jling-S	
255	Jl. H.O.S Cokroaminoto	0.297	Jling-S	
256	Jl. Una-una II	0.298	Jling-S	
257	Jl. Teluk Tomini II	0.299	Jling-S	
258	Jl. Bakuku II	0.300	Jling-S	
259	Jl. Tomada	0.300	Jling-S	
260	Jl. Salu Maleni I	0.300	Jling-S	
261	Jl. Kelinci	0.301	Jling-S	
262	Jl. Tanjung Bulu	0.302	Jling-S	
263	Jl. Omar Syarif	0.302	Jling-S	
264	Jl. Wiro	0.302	Jling-S	
265	Jl. Lembaga	0.302	Jling-S	
266	Jl. Sugiono	0.302	Jling-S	
267	Jl. Pelita Air Permai II	0.306	Jling-S	
268	Jl. Mulawarman	0.306	Jling-S	
269	Jl. Tupai	0.307	Jling-S	
270	Jl. Puro	0.308	Jling-S	
271	Jl. Mangga I	0.309	Jling-S	
272	Jl. Jeruk	0.309	Jling-S	
273	Jl. Pemuda	0.309	Jling-S	
274	Jl. Nenas	0.310	Jling-S	
275	Jl. Una-una	0.311	Jling-S	
276	Jl. Sriwijaya	0.312	Jling-S	
277	Jl. Gunung Tinombala II	0.313	Jling-S	
278	Jl. Gagak	0.316	Jling-S	
279	Jl. Sungai Miu	0.317	Jling-S	
280	Jl. Tanjung Tada II	0.318	Jling-S	
281	Jl. Herianto	0.320	Jling-S	
282	Jl. Sisinga Mangaraja IV	0.320	Jling-S	
283	Jl. Uwe Borro	0.321	Jling-S	
284	Jl. Purnawirawan III	0.323	Jling-S	
285	Jl. Kambarogo	0.324	Jling-S	
286	Jl. Batu Panaika	0.325	Jling-S	
287	Jl. Tipo	0.327	Jling-S	
288	Jl. Tanjung Malino	0.327	Jling-S	

<b>No.</b>	<b>Jalan</b>	<b>Panjang (Km)</b>	<b>Fungsi Hirarki</b>	<b>Keterangan</b>
<b>C</b>	<b>Jalan Kota</b>			
289	Jl. Marjun Habi	0.328	Jling-S	
290	Jl. Onta	0.329	Jling-S	
291	Jl. Raden Saleh I	0.330	Jling-S	
292	Jl. Anuta Pura	0.330	Jling-S	
293	Jl. Palawatika	0.330	Jling-S	
294	Jl. Tanjung Harapan I	0.332	Jling-S	
295	Jl. Pakora I	0.332	Jling-S	
296	Jl. Pipikoro	0.333	Jling-S	
297	Jl. Pue Indah I	0.335	Jling-S	
298	Jl. Zebra V	0.337	Jling-S	
299	Jl. Kimaja Lr. Bakso	0.338	Jling-S	
300	Jl. Jati Petobo	0.340	Jling-S	
301	Jl. Ketimun	0.342	Jling-S	
302	Jl. Sungai Ogomojolo	0.342	Jling-S	
303	Jl. Panjaitan	0.342	Jling-S	
304	Jl. Bukit Jabal Rahma	0.343	Jling-S	
305	Jl. Urip Sumoharjo	0.346	Jling-S	
306	Jl. Kesadaran I	0.348	Jling-S	
307	Jl. Uwe Salura	0.348	Jling-S	
308	Jl. Tendean	0.348	Jling-S	
309	Jl. Valengapa	0.348	Jling-S	
310	Jl. Gerima	0.350	Jling-S	
311	Jl. Veteran VI	0.350	Jling-S	
312	Jl. Ramba I	0.351	Jling-S	
313	Jl. Tanjung Tururuka I	0.351	Jling-S	
314	Jl. Watumapida	0.351	Jling-S	
315	Jl. Poe Camba	0.353	Jling-S	
316	Jl. Tanjung Balantak	0.353	Jling-S	
317	Jl. Paramedis	0.353	Jling-S	
318	Jl. H. Sabande	0.355	Jling-S	
319	Jl. Kabasara	0.356	Jling-S	
320	Jl. Sungai Lewara	0.357	Jling-S	
321	Jl. Pala	0.357	Jling-S	
322	Jl. Jati Emas	0.360	Jling-S	
323	Jl. Angkasa	0.360	Jling-S	
324	Jl. Kalora	0.361	Jling-S	

<b>No.</b>	<b>Jalan</b>	<b>Panjang (Km)</b>	<b>Fungsi Hirarki</b>	<b>Keterangan</b>
<b>C</b>	<b>Jalan Kota</b>			
325	Jl. Sungai Moutong	0.363	Jling-S	
326	Jl. Kenanga	0.367	Jling-S	
327	Jl. Sultan Allauddin	0.370	Jling-S	
328	Jl. Vinase	0.373	Jling-S	
329	Jl. Sintuvu Palu Utara	0.380	Jling-S	
330	Jl. Pipit	0.380	Jling-S	
331	Jl. Harapan Baru	0.381	Jling-S	
332	Jl. Tadjolo Reo	0.381	Jling-S	
333	Jl. Bayu	0.382	Jling-S	
334	Jl. Sambalangi Panda	0.382	Jling-S	
335	Jl. Domba	0.383	Jling-S	
336	Jl. Pakora II	0.383	Jling-S	
337	Jl. Puskesmas	0.385	Jling-S	
338	Jl. Katamso	0.385	Jling-S	
339	Jl. Kancil III	0.387	Jling-S	
340	Jl. Hayam Wuruk II	0.387	Jling-S	
341	Jl. Kalantaro I	0.388	Jling-S	
342	Jl. Moma	0.390	Jling-S	
343	Jl. Seruni Raya	0.391	Jling-S	
344	Jl. Teluk Tolo	0.392	Jling-S	
345	Jl. Sungai Saddan	0.395	Jling-S	
346	Jl. Taipa Losi	0.395	Jling-S	
347	Jl. Slamet Riyadi	0.396	Jling-S	
348	Jl. Jati Super	0.398	Jling-S	
349	Jl. Delima	0.400	Jling-S	
350	Jl. Tomampe	0.401	Jling-S	
351	Jl. Rambutan	0.401	Jling-S	
352	Jl. Talaga Raya	0.403	Jling-S	
353	Jl. Samudra II	0.408	Jling-S	
354	Jl. Pelita Air Permai I	0.410	Jling-S	
355	Jl. Boya Talise	0.411	Jling-S	
356	Jl. Sekunder II	0.411	Jling-S	
357	Jl. Beo	0.414	Jling-S	
358	Jl. Lamarani	0.417	Jling-S	
359	Jl. Toyota	0.418	Jling-S	
360	Jl. Sungai Ogotion	0.419	Jling-S	
361	Jl. Saleko II	0.420	Jling-S	

<b>No.</b>	<b>Jalan</b>	<b>Panjang (Km)</b>	<b>Fungsi Hirarki</b>	<b>Keterangan</b>
<b>C</b>	<b>Jalan Kota</b>			
362	Jl. Dae Salembah	0.421	Jling-S	
363	Jl. Anggur II	0.422	Jling-S	
364	Jl. Bakuku	0.424	Jling-S	
365	Jl. Wae Tumbu	0.425	Jling-S	
366	Jl. Abadi	0.427	Jling-S	
367	Jl. Nangka Palu Timur	0.431	Jling-S	
368	Jl. Merpati II B	0.433	Jling-S	
369	Jl. Samudra	0.445	Jling-S	
370	Jl. Samudra Pantoloan	0.445	Jling-S	
371	Jl. Buvu Bionga	0.447	Jling-S	
372	Jl. Malontara I	0.447	Jling-S	
373	Jl. Balai Kota Utara	0.450	Jling-S	
374	Jl. Simpati	0.451	Jling-S	
375	Jl. Kayu Rampe	0.452	Jling-S	
376	Jl. Samudra III	0.456	Jling-S	
377	Jl. Tanjung Angin	0.457	Jling-S	
378	Jl. Paparonto	0.459	Jling-S	
379	Jl. Andudana	0.460	Jling-S	
380	Jl. Watusampu I	0.464	Jling-S	
381	Jl. Tanjung Pesik	0.465	Jling-S	
382	Jl. Kancil II	0.466	Jling-S	
383	Jl. Asam I	0.467	Jling-S	
384	Jl. Kelapa II	0.469	Jling-S	
385	Jl. Rumah Sakit Islam	0.470	Jling-S	
386	Jl. Baruga Palu Utara	0.476	Jling-S	
387	Jl. Ramba Baiya	0.476	Jling-S	
388	Jl. Baruga	0.476	Jling-S	
389	Jl. Lagarutu II	0.476	Jling-S	
390	Jl. Mangunsarkoro	0.476	Jling-S	
391	Jl. Langsung	0.477	Jling-S	
392	Jl. Tanainolo	0.477	Jling-S	
393	Jl. Mawar	0.477	Jling-S	
394	Jl. Sriwijaya II	0.477	Jling-S	
395	Jl. Bayam	0.478	Jling-S	
396	Jl. Kue Bongo	0.480	Jling-S	

<b>No.</b>	<b>Jalan</b>	<b>Panjang (Km)</b>	<b>Fungsi Hirarki</b>	<b>Keterangan</b>
<b>C</b>	<b>Jalan Kota</b>			
397	Jl. Tanjung Seng	0.480	Jling-S	
398	Jl. Jaelangkara	0.481	Jling-S	
399	Jl. Datu Pamusu Kayumalue Pajeko	0.481	Jling-S	
400	Jl. Merpati II A	0.487	Jling-S	
401	Jl. Kijang IV Utara	0.489	Jling-S	
402	Jl. Gelatik	0.492	Jling-S	
403	Al Jufri	0.493	Jling-S	
404	Jl. Gunung Loli	0.497	Jling-S	
405	Jl. Halmahera	0.497	Jling-S	
406	Jl. Purnawirawan	0.499	Jling-S	
407	Jl. Miangas I	0.499	Jling-S	
408	Jl. Kijang II Utara	0.500	Jling-S	
409	Jl. Kanna	0.502	Jling-S	
410	Jl. Bali	0.503	Jling-S	
411	Jl. Singgani	0.505	Jling-S	
412	Jl. Kangkung	0.509	Jling-S	
413	Jl. Tanamea	0.510	Jling-S	
414	Jl. Pelita Air Permai	0.510	Jling-S	
415	Jl. Bukit Sova	0.512	Jling-S	
416	Jl. Sungai Surumana	0.515	Jling-S	
417	Jl. Miangas	0.518	Jling-S	
418	Jl. Kutilang	0.519	Jling-S	
419	Jl. Dupa I	0.520	Jling-S	
420	Jl. Sultan Alauddin	0.522	Jling-S	
421	Jl. Malaya	0.522	Jling-S	
422	Jl. Meranti	0.522	Jling-S	
423	Jl. Ongka Malino	0.524	Jling-S	
424	Jl. Tanjung Harapan	0.526	Jling-S	
425	Jl. Balai Kota Timur	0.530	Jling-S	
426	Jl. Melati Palu Timur	0.538	Jling-S	
427	Jl. H. Samauna	0.542	Jling-S	
428	Jl. Basuki Rahmat Lr. Perjuangan	0.542	Jling-S	
429	Jl. Pagaru Lemba	0.544	Jling-S	
430	Jl. Towua I	0.545	Jling-S	
431	Jl. Melati	0.545	Jling-S	
432	Jl. Chairil Anwar	0.545	Jling-S	
433	Jl. Rono	0.548	Jling-S	

<b>No.</b>	<b>Jalan</b>	<b>Panjang (Km)</b>	<b>Fungsi Hirarki</b>	<b>Keteranga n</b>
<b>C</b>	<b>Jalan Kota</b>			
434	Jl. Pramuka	0.553	Jling-S	
435	Jl. Uwe Goda I	0.554	Jling-S	
436	Jl. Sultan Alaudin	0.556	Jling-S	
437	Jl. Yojokodi	0.556	Jling-S	
438	Jl. Veteran II	0.558	Jling-S	
439	Jl. Kadia	0.559	Jling-S	
440	Jl. Sutoyo	0.563	Jling-S	
441	Jl. Dewi Sartika VII	0.564	Jling-S	
442	Jl. Jamur	0.565	Jling-S	
443	Jl. Pue Garuda	0.565	Jling-S	
444	Jl. Bone	0.566	Jling-S	
445	Jl. Rusa	0.567	Jling-S	
446	Jl. Kancil	0.569	Jling-S	
447	Jl. Hang Tuah I	0.570	Jling-S	
448	Jl. Uve Nema	0.575	Jling-S	
449	Jl. Kramat Jaya	0.584	Jling-S	
450	Jl. Rajawali	0.589	Jling-S	
451	Jl. Pengawu	0.589	Jling-S	
452	Jl. LIK Roviga	0.591	Jling-S	
453	Jl. Srikaya	0.592	Jling-S	
454	Jl. Tembang	0.592	Jling-S	
455	Jl. Yasal	0.592	Jling-S	
456	Jl. Asam III	0.593	Jling-S	
457	Jl. Sungai Wera	0.593	Jling-S	
458	Jl. Zebra VI	0.595	Jling-S	
459	Jl. Jambu	0.596	Jling-S	
460	Jl. Cendana Boya Oge	0.597	Jling-S	
461	Jl. Jati Lr. IV	0.599	Jling-S	
462	Jl. Lasapandi	0.604	Jling-S	
463	Jl. Sungai Malino	0.607	Jling-S	
464	Jl. Gereja	0.609	Jling-S	
465	Jl. Tolamunte	0.612	Jling-S	
466	Jl. Bouraq	0.613	Jling-S	
467	Jl. Kesadaran	0.613	Jling-S	
468	Jl. Nusakambangan	0.613	Jling-S	
469	Jl. Bougenvile	0.614	Jling-S	
470	Jl. Towua II	0.620	Jling-S	
471	Jl. Sorofele	0.621	Jling-S	

<b>No.</b>	<b>Jalan</b>	<b>Panjang (Km)</b>	<b>Fungsi Hirarki</b>	<b>Keterangan</b>
<b>C</b>	<b>Jalan Kota</b>			
472	Jl. Cakalang Palu Barat	0.625	Jling-S	
473	Jl. Purnawirawan II	0.625	Jling-S	
474	Jl. Tolambu Baiya	0.627	Jling-S	
475	Jl. Teratai Petobo	0.627	Jling-S	
476	Jl. Batu Bata Indah I	0.628	Jling-S	
477	Jl. Sisinga Mangaraja III	0.632	Jling-S	
478	Jl. Rata Lemba	0.633	Jling-S	
479	Jl. Pengalemba	0.636	Jling-S	
480	Jl. Merak	0.637	Jling-S	
481	Jl. Tondei	0.650	Jling-S	
482	Jl. Arif Rahman Hakim	0.652	Jling-S	
483	Jl. Asam II	0.662	Jling-S	
484	Jl. Datu Masuci	0.662	Jling-S	
485	Jl. Swadaya	0.663	Jling-S	
486	Jl. Dupa II	0.669	Jling-S	
487	Jl. Pua kodi	0.673	Jling-S	
488	Jl. Nangka Palu Barat	0.674	Jling-S	
489	Jl. Kedondong II	0.686	Jling-S	
490	Jl. Merdeka	0.692	Jling-S	
491	Jl. MT. Haryono	0.692	Jling-S	
492	Jl. Tolambu	0.693	Jling-S	
493	Jl. Tavanjuka II	0.695	Jling-S	
494	Jl. Lele Mina	0.701	Jling-S	
495	Jl. Sungai Sausu	0.702	Jling-S	
496	Jl. Salu Maleni II	0.712	Jling-S	
497	Jl. Abd. Rahman Saleh III	0.713	Jling-S	
498	Jl. Cemangi	0.716	Jling-S	
499	Jl. Ramba	0.725	Jling-S	
500	Jl. Tavanjuka Mas	0.729	Jling-S	
501	Jl. Lapangan Golf	0.733	Jling-S	
502	Jl. Tanderante	0.735	Jling-S	
503	Jl. Veteran III	0.736	Jling-S	
504	Jl. Ino Toa	0.741	Jling-S	
505	Jl. Hayam Wuruk	0.743	Jling-S	

<b>No.</b>	<b>Jalan</b>	<b>Panjang (Km)</b>	<b>Fungsi Hirarki</b>	<b>Keterangan</b>
<b>C</b>	<b>Jalan Kota</b>			
506	Jl. Anoa II	0.744	Jling-S	
507	Jl. Uwe Uno	0.755	Jling-S	
508	Jl. Sulawesi	0.759	Jling-S	
509	Jl. Kihajar Dewantara	0.764	Jling-S	
510	Jl. Antropologi	0.766	Jling-S	
511	Jl. Terminal Tipo	0.768	Jling-S	
512	Jl. Lap. Ocele Kayu Malue	0.768	Jling-S	
513	Jl. Elang II	0.774	Jling-S	
514	Jl. Taipa Beach	0.775	Jling-S	
515	Jl. Otista	0.793	Jling-S	
516	Jl. Beringin	0.795	Jling-S	
517	Jl. Manunggal	0.801	Jling-S	
518	Jl. Sinombili	0.804	Jling-S	
519	Jl. Padat Karya Duyu	0.806	Jling-S	
520	Jl. Tadulako II	0.814	Jling-S	
521	Jl. Undata	0.814	Jling-S	
522	Jl. Hasanuddin Toto	0.819	Jling-S	
523	Jl. Teratai	0.821	Jling-S	
524	Jl. Pipa Air	0.822	Jling-S	
525	Jl. Mataram	0.822	Jling-S	
526	Jl. Lentora	0.824	Jling-S	
527	Jl. Trans LIK Layana Indah	0.826	Jling-S	Layana Bawah
528	Jl. Cumi-cumi Lama	0.831	Jling-S	
529	Jl. Mangga	0.832	Jling-S	
530	Jl. LIK Layana Indah	0.833	Jling-S	
531	Jl. Dewi Sartika V	0.835	Jling-S	
532	Jl. Kanuna	0.836	Jling-S	
533	Jl. Zebra Star	0.842	Jling-S	
534	Jl. Yambaare	0.844	Jling-S	
535	Jl. Labu	0.845	Jling-S	
536	Jl. Ganogo	0.845	Jling-S	
537	Jl. Vatu Moenta	0.845	Jling-S	
538	Jl. Simpati II	0.850	Jling-S	
539	Jl. Jalur Gaza	0.866	Jling-S	
540	Jl. Datu Pamusu	0.867	Jling-S	
541	Jl. Kekentina	0.867	Jling-S	

<b>No.</b>	<b>Jalan</b>	<b>Panjang (Km)</b>	<b>Fungsi Hirarki</b>	<b>Keterangan</b>
<b>C</b>	<b>Jalan Kota</b>			
542	Jl. Yodo	0.870	Jling-S	
543	Jl. Labuan Mberu	0.889	Jling-S	
544	Jl. Zebra III	0.890	Jling-S	
545	Jl. Anggur	0.892	Jling-S	
546	Jl. Sekunder	0.895	Jling-S	
547	Jl. Kijang Selatan	0.908	Jling-S	
548	Jl. Batu Bata Indah	0.911	Jling-S	
549	Jl. Ippi	0.916	Jling-S	
550	Jl. Cemara	0.918	Jling-S	
551	Jl. Mangu	0.919	Jling-S	
552	Jl. Mawas	0.930	Jling-S	
553	Jl. Rendelele	0.940	Jling-S	
554	Jl. Malino	0.942	Jling-S	
555	Jl. Masjid Darul Hikmah	0.948	Jling-S	
556	Jl. Kampung Nelayan	0.959	Jling-S	
557	Jl. Sengon Raya	0.990	Jling-S	
558	Jl. Penanda	0.996	Jling-S	
559	Jl. Cakalang Palu Timur	1.000	Jling-S	
560	Jl. TPA. Tinja	1.000	Jling-S	
561	Jl. Roviga	1.011	Jling-S	
562	Jl. Pendidikan	1.020	Jling-S	
563	Jl. Jabal Nur	1.023	Jling-S	
564	Jl. Teluk Tomini	1.036	Jling-S	
565	Jl. Zebra II	1.050	Jling-S	
566	Jl. D.S Lamangkona	1.055	Jling-S	
567	Jl. Mutiara	1.100	Jling-S	
568	Jl. Selar	1.120	Jling-S	
569	Jl. Kebun Sari	1.120	Jling-S	
570	Jl. Tagari Lonjo	1.121	Jling-S	
571	Jl. Zebra I	1.150	Jling-S	
572	Jl. Elang III	1.150	Jling-S	
573	Jl. Rarajidondo	1.153	Jling-S	
574	Jl. Zebra IV	1.155	Jling-S	
575	Jl. Sumur Yuga	1.171	Jling-S	
576	Jl. Padat Karya	1.175	Jling-S	
577	Jl. Hayam Wuruk Petobo	1.195	Jling-S	

<b>No.</b>	<b>Jalan</b>	<b>Panjang (Km)</b>	<b>Fungsi Hirarki</b>	<b>Keteranga n</b>
<b>C</b>	<b>Jalan Kota</b>			
578	Jl. Agatis	1.196	Jling-S	
579	Jl. Palupi Jaya	1.240	Jling-S	
580	Jl. S. Palayua	1.249	Jling-S	
581	Jl. Anggrek Buluri	1.263	Jling-S	
582	Jl. Salambara	1.277	Jling-S	
583	Jl. Ndatengisi	1.281	Jling-S	
584	Jl. Tavanjuka	1.295	Jling-S	
585	Jl. Puenjdi Kabonena	1.300	Jling-S	
586	Jl. Bulili	1.300	Jling-S	
587	Jl. Terminal Petobo	1.313	Jling-S	
588	Jl. Tanggul Utara	1.316	Jling-S	
589	Jl. Uevuku	1.328	Jling-S	
590	Jl. Kasuari	1.334	Jling-S	
591	Jl. Tandu Lemba	1.367	Jling-S	
592	Jl. Kesehatan	1.397	Jling-S	
593	Jl. Tandame	1.413	Jling-S	
594	Jl. Kamboja Palu Barat	1.435	Jling-S	
595	Jl. Watutela	1.500	Jling-S	
596	Jl. Mantilayo	1.509	Jling-S	
597	Jl. SMPN 12 Palu	1.549	Jling-S	
598	Jl. Kamboja Palu Timur	1.580	Jling-S	
599	Jl. Uwe Numpu Padanjese	1.594	Jling-S	
600	Jl. Wenumpu	1.594	Jling-S	
601	Jl. Biologi	1.664	Jling-S	
602	Jl. Lik Roviga I	1.682	Jling-S	
603	Jl. Pekuburan Teratai	1.768	Jling-S	
604	Jl. Keramik	1.772	Jling-S	
605	Jl. Intstalasi Pengolah Lumpur Tinja	1.792	Jling-S	
606	Jl. Lekatu Tavanjuka	1.796	Jling-S	
607	Jl. Belakang Kampus Untad	1.806	Jling-S	
608	Jl. Watusampu	1.885	Jling-S	
609	Jl. Dayo Dara	1.896	Jling-S	
610	Jl. Tompotika	1.933	Jling-S	

<b>No.</b>	<b>Jalan</b>	<b>Panjang (Km)</b>	<b>Fungsi Hirarki</b>	<b>Keterangan</b>
<b>C</b>	<b>Jalan Kota</b>			
611	Jl. Bandes	1.934	Jling-S	
612	Jl. Tekukur	1.975	Jling-S	
613	Jl. Padat Karya Tondo	1.989	Jling-S	
614	Jl. Kavole	1.998	Jling-S	
615	Jl. Lembu	2.044	Jling-S	
616	Jl. Bulu Masomba I	2.141	Jling-S	
617	Jl. Soekarno-Hatta I	2.199	Jling-S	
618	Jl. Ginggiri	2.200	Jling-S	
619	Jl. Watueja	2.240	Jling-S	
620	Jl. TPA. Kawatuna	2.257	Jling-S	
621	Jl. Duyu	2.274	Jling-S	
622	Jl. Malontara	2.421	Jling-S	
623	Jl. Jepang	2.591	Jling-S	
624	Jl. Bangau	2.672	Jling-S	
625	Jl. Lagarutu	2.683	Jling-S	
626	Jl. BTN Palupi	2.746	Jling-S	
627	Jl. Mantikulore	2.992	Jling-S	
628	Jl. Lambara Liku	3.175	Jling-S	
629	Jl. Untad I	3.279	Jling-S	
630	Jl. Desa Kalora	3.420	Jling-S	
631	Jl. Lekatu Tipo	3.611	Jling-S	
632	Jl. Nosarara Nosabatutu	3.880	Jling-S	
633	Jl. Nunumbuku	3.907	Jling-S	
634	Jl. Lingkar Luar	4.000	Jling-S	
635	Jl. Lambara Vinase / Tompotika	4.220	Jling-S	
636	Jl. Trans LIK DIPA - Indah	4.238	Jling-S	Layana Atas
637	Jl. Limran	4.260	Jling-S	
638	Jl. Uwentumbu Kawatuna	5.000	Jling-S	
639	Jl. Agrowisata Poboya	5.000	Jling-S	
640	Jl. Tanggul Selatan	5.238	Jling-S	
641	Jl. H. Patila	6.000	Jling-S	
642	Jl. Pue Mbala	6.100	Jling-S	
<b>Total</b>		<b>387.208</b>		

### **3.4.2 Terminal**

- a. Terminal Tipe C meliputi :
  - 1) Rencana terminal Tipe c yaitu Terminal Sudirman di Jl. Sudirman di Kecamatan Palu Timur yang melayani Angkutan Kota (ANGKOT).
  - 2) Rencana terminal tipe C meliputi Terminal Petobo di Kecamatan Palu Selatan, Terminal Manonda di Kecamatan Palu Barat, Terminal Lasoani di Kecamatan Mantikulore dan Terminal Tawaeli di Kecamatan Tawaeli.

### **3.4.3 Rencana Jaringan Kereta Api**

1. Jaringan Jalur Kereta Api KA  
Rencana jalur kereta api melewati Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Mantikulore, Kecamatan Palu selatan, Kecamatan Tatanga, Kecamatan Palu Barat dan Kecamatan Ulujadi.
2. Stasiun KA  
Rencana Stasiun Kereta Api di Kecamatan Tawaeli, Kecamatan Mantikulore, Kecamatan Palu Selatan, dan Kecamatan Ulujadi.

### **3.4.4 Sistem Jaringan Penyeberangan**

1. Lintas penyeberangan terdiri atas:
  - a. Lintas penyeberangan antar kabupaten/kota yaitu Palu-Kabonga Besar (PP).
2. Pelabuhan penyeberangan  
Pelabuhan Penyeberangan Kelas I yaitu Pelabuhan Penyeberangan Taipa di Kecamatan Palu Utara.

### **3.5. Penentuan Isu-isu strategis**

Penentuan Isu strategis ini juga berdasarkan pada permasalahan yang terkait pada urusan bidang perhubungan yang merujuk pada RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 yaitu :

1. Belum maksimalnya penataan dan pengawasan trayek angkutan umum dan angkutan barang di Kota Palu;
2. Pengembangan Angkutan Masaal yang memadai;
3. Belum optimalnya manajemen perpakiran di Kota Palu;
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana (Utama dan pendukung) Dinas Perhubungan Kota.

Permasalahan diatas menjadi suatu rumusan dalam penentuan isu stategis Dinas Perhubungan untuk menata, mengelola, memperbaiki serta mengembangkan sistem transportasi darat yang ada di wilayah Kota Palu

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kota Palu**

Di dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Palu Tahun 2021-2026 termuat tujuan dan sasaran strategis yang penetapannya berdasarkan visi, misi, dan faktor-faktor kunci keberhasilan yang mengacu pada RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Palu mengacu pada RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021 yaitu :



Adapun sasaran strategis yang menjadi Indikator Kinerja Utaman dari Dinas Perhubungan Kota Palu yang merupakan integral dalam proses perencanaan strategik organisasi yang dirumuskan guna mendukung tujuan dan sasaran dari Dinas Perhubungan Kota Palu yang termuat dalam RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021.

Tujuan dan sasaran jangka menengah dari Rensta Dinas Perhubungan Kota Palu Tahun 2016 dalam rangka mendukung

pencapaian visi, misi, tujuan serta sasaran di gambarkan pada Tabel 4.1 di bawah ini :

**Tabel 4.1**  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  
Dinas Perhubungan Kota Palu

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
[1]	[2]	[3]	[4]	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas sistem transportasi darat	Meningkatkan kinerja layanan transportasi darat	Indeks Kota Layak Huni	60	62	63	63,5	64
			Persentase Layanan Angkutan Darat	19.51%	21.04%	23.14%	25.92%	29.51%
2	Mewujudkan reformasi birokrasi Dinas Perhubungan Kota Palu	Meningkatkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan Kota Palu	CC (>50-60)	B (>60-70)	B (>60-70)	B (>60-70)	A (>80-90)
			Nilai SAKIP	B (65,50)	B(66,50)	B(67,50)	B(68,50)	B(69,50)

Sumber : RPJMD Kota Palu 2021-2026

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Palu**

Dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kota Palu harus berkesinambungan terhadap Visi dan Misi Kota Palu yang termuat dalam RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026. Berikut Tabel 5.1, yang menjabarkan mengenai rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kota Palu, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 5.1**

**Strategi dan Arah Kebijakan**

**VISI : Membangun Kota Palu yang mandiri, aman, dan nyaman, tangguh, serta profesional dalam konteks pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal dan keagamaan**

**MISI 2 : Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrakstruktur yang berketahanan terhadap bencana**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya kualitas sistem transportasi darat.	Meningkatkan kinerja layanan transportasi darat	Meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem transportasi yang terpadu	Membangun dan meningkatkan kualitas prasarana jalan yang terpadu dengan simpul-simpul kegiatan
			Mengembangkan sistem jaringan transportasi perkotaan berbasis jalan yang terpadu

---

**MISI 4 : Menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Mewujudkan reformasi birokrasi Dinas Perhubungan Kota Palu	Meningkatkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	Menjalankan sistem pemeritahan yang akuntabel dan transparan	Menerapkan sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi

Sumber: RPJMD Kota Palu 2021-2026

Tabel di atas menunjukkan kesinambungan antara visi, misi dan arah kebijakan dari Dinas Perhubungan Kota Palu yang mengacu kepada RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026.

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Palu Tahun 2021-2026 terdiri dari 2 Program 20 kegiatan serta 47 sub kegiatan yang dapat dilihat pada Tabel 6.1 sebagai berikut :

**Tabel 6.1**

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2022-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN															
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD					
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	Mewujudkan reformasi birokrasi Dinas Perhubungan Kota Palu				Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan Kota Palu	N/A	CC (>50-60)			B (>60-70)			B (>60-70)			B (>60-70)			A (>80-90)			A (>80-90)
		Meningkatkan birokrasi yang bersih dan akuntabel			Nilai SAKIP	BAIK	B (65,50)			B(66,50)			B(67,50)			B(68,50)			B(69,50)			B(69,50)
			2	15	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota														
			2	15	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	2 dok	Rp 17.679.875	2 dok	Rp 17.679.875	2 dok	Rp 19.447.863	2 dok	Rp 19.447.863	2 dok	Rp 19.447.863	10 dok	Rp 93.703.338
			2	15	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	1 dok	Rp 16.628.250	1 dok	Rp 16.628.250	1 dok	Rp 18.291.075	1 dok	Rp 18.291.075	1 dok	Rp 18.291.075	5 dok	Rp 88.129.725

			2	15	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA SKPD		1 dok	Rp 15.128.475	1 dok	Rp 15.128.475	1 dok	Rp 16.641.323	1 dok	Rp 16.641.323	1 dok	Rp 16.641.323	5 dok	Rp 80.180.918
			2	15	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	1 dok												
			2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dok	1 dok	Rp 13.149.275	1 dok	Rp 13.149.275	1 dok	Rp 14.464.203	1 dok	Rp 14.464.203	1 dok	Rp 14.464.203	5 dok	Rp 69.691.158
			2	15	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
			2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bln	12 bln	Rp 7.367.897.490	12 bln	Rp 7.567.897.490	12 bln	Rp 7.750.432.200	12 bln	Rp 7.867.897.490	12 bln	Rp 7.867.897.490	60 bln	Rp 38.422.022.160
			2	15	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	12 bln	12 bln	Rp 33.702.100	12 bln	Rp 33.702.100	12 bln	Rp 35.800.000	12 bln	Rp 37.072.310	12 bln	Rp 39.380.000	60 bln	Rp 179.656.510
			2	15	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													
			2	15	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				12 bln	Rp 22.500.000			12 bln	Rp 22.500.000			24 bln	Rp 45.000.000



			2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bln	12 bln	Rp 12.900.000	12 bln	Rp 12.900.000	12 bln	Rp 14.190.000	12 bln	Rp 14.190.000	12 bln	Rp 15.609.000	60 bln	Rp 69.789.000
			2	15	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	12 bln	12 bln	Rp 5.500.000	12 bln	Rp 5.500.000	12 bln	Rp 6.500.000	12 bln	Rp 7.500.000	12 bln	Rp 8.500.000	60 bln	Rp 33.500.000
			2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bln	12 bln	Rp 462.823.000	12 bln	Rp 462.823.000	12 bln	Rp 475.000.000	12 bln	Rp 475.000.000	12 bln	Rp 475.000.000	60 bln	Rp 2.350.646.000
			2	15	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
			2	15	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1 unit	Rp 35.000.000	1 unit	Rp 35.000.000	1 unit	Rp 285.000.000					3 unit	Rp 355.000.000
			2	15	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 paket	Rp 691.063.707					1 paket	Rp 1.087.069.541	2 paket	Rp 1.778.133.248
			2	15	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
			2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bln	12 bln	Rp 160.800.000	12 bln	Rp 160.800.000	12 bln	Rp 165.000.000	12 bln	Rp 165.000.000	12 bln	Rp 165.000.000	60 bln	Rp 816.600.000

			2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bln	12 bln	Rp 2.225.931.550	12 bln	Rp 2.225.931.550	12 bln	Rp 2.225.931.550	12 bln	Rp 2.225.931.550	60 bln	Rp 11.129.657.750		
			2	15	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
			2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bln	12 bln	Rp 281.300.000	12 bln	Rp 281.300.000	Rp 290.300.000	Rp 300.000.000	Rp 309.430.000	60 bln	Rp 1.462.330.000			
			2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bln	12 bln	Rp 213.460.000	12 bln	Rp 213.460.000	12 bln	Rp 225.500.000	12 bln	Rp 225.500.000	60 bln	Rp 1.103.420.000		
			2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bln	12 bln	Rp 10.011.900	12 bln	Rp 10.011.900	12 bln	Rp 11.013.090	12 bln	Rp 12.114.399	60 bln	Rp 55.265.688		
			2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bln	12 bln	Rp 75.000.000	12 bln	Rp 112.500.000	12 bln	Rp 112.500.000	12 bln	Rp 112.500.000	60 bln	Rp 525.000.000		
			2	15	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bln	12 bln	Rp 9.300.000	12 bln	Rp 9.300.000	12 bln	Rp 10.230.000	12 bln	Rp 11.253.000	60 bln	Rp 51.336.000		

2	Meningkatnya kualitas sistem transportasi darat.								Indeks Kota Layak Huni	N/A	60		62		63		63,5		64		64		
	Meningkatkan kinerja layanan transportasi darat								Persentase Layanan Angkutan Darat	17,99%	19.51%		21.04%		23.14%		25.92%		29.51%		29.51%		
		2	15	02					<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>														
		2	15	02	2.01				<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>	Cakupan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota													
		2	15	02	2.01	01			Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 dok	Rp 550.000.000	1 dok	Rp 123.500.000			1 dok	Rp 100.000.000			3 dok	Rp 773.500.000	
		2	15	02	2.02				<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>													
		2	15	02	2.02	02			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1 paket	Rp 106.539.000	1 paket	Rp 75.000.000	1 paket	Rp 75.000.000	1 paket	Rp 75.000.000	1 paket	Rp 75.000.000	5 paket	Rp 406.539.000	
		2	15	02	2.02	04			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	12 bln	12 bln	Rp 101.944.788	12 bln	Rp 103.000.000	12 bln	Rp 105.000.000	12 bln	Rp 105.000.000	12 bln	Rp 105.000.000	60 bln	Rp 519.944.788
		2	15	02	2.03				<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>Cakupan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>													
		2	15	02	2.03	01			Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	1 dok	Rp 150.375.000			1 dok	Rp 85.000.000					2 dok	Rp 235.375.000	

			2	15	02	2.03	02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Pembangunan Gedung Terminal		1 paket	Rp 175.000.000					1 paket	Rp 512.306.519	1 paket	Rp 84.479.543	3 paket	Rp 771.786.062
			2	15	02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	12 bln	12 bln	Rp 54.868.500	12 bln	Rp 73.668.500	12 bln	Rp 85.000.000	12 bln	Rp 95.000.000	12 bln	Rp 105.000.000	60 bln	Rp 413.537.000
			2	15	02	2.04		<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>Cakupan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>													
			2	15	02	2.04	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		1 paket	Rp 750.697.250		Rp -	1 paket	Rp 500.000.000	1 paket	Rp 500.000.000		Rp -	3 paket	Rp 1.750.697.250
			2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 bln	12 bln	Rp 2.786.401.000	12 bln	Rp 2.515.000.000	12 bln	Rp 2.249.794.601	12 bln	Rp 2.627.080.596	12 bln	Rp 2.470.000.000	60 bln	Rp 12.648.276.197
			2	15	02	2.05		<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>Cakupan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>													
			2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	12 bln	Rp 60.846.000	12 bln	Rp 450.000.000	12 bln	Rp 45.000.000	12 bln	Rp 47.500.000	12 bln	Rp 500.000.000	60 bln	Rp 1.103.346.000
			2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				12 bln	Rp 40.000.000	12 bln	Rp 50.000.000	12 bln	Rp 55.000.000	12 bln	Rp 60.000.000	48 bln	Rp 205.000.000

			2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					12 bln	Rp	6.000.000	12 bln	Rp	6.000.000	12 bln	Rp	6.000.000	12 bln	Rp	6.000.000	48 bln	Rp	24.000.000			
			2	15	02	2.05	09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									1 paket	Rp	5.000.000						1 paket	Rp	5.000.000			
			2	15	02	2.06		<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan</b>																						
			2	15	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas			1 pkt	Rp	71.157.500	1 pkt	Rp	75.000.000	1 pkt	Rp	85.000.000	1 pkt	Rp	105.000.000	1 pkt	Rp	105.000.000	5 pkt	Rp	441.157.500		
			2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota					12 bln	Rp	26.500.000	12 bln	Rp	27.500.000	12 bln	Rp	28.500.000	12 bln	Rp	30.000.000	48 bln	Rp	112.500.000			
			2	15	02	2.07		<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>																						
			2	15	02	2.07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin			12 bln		12 bln	Rp	11.069.000	12 bln	Rp	13.069.000	12 bln	Rp	15.000.000	12 bln	Rp	17.000.000	12 bln	Rp	18.050.000	60 bln	Rp	74.188.000



			2	15	02	2.11	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 bln	12 bln	Rp 580.000.000	12 bln	Rp 750.000.000	12 bln	Rp 812.500.000	12 bln	Rp 862.500.000	12 bln	Rp 886.323.300	60 bln	Rp 3.891.323.300
			2	15	02	2.14		<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>													
			2	15	02	2.14	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 bln	12 bln	Rp 7.500.000	12 bln	Rp 12.500.000	12 bln	Rp 14.500.000	12 bln	Rp 16.500.000	12 bln	Rp 17.500.000	60 bln	Rp 68.500.000
			2	15	02	2.16		<b>Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>													
			2	15	02	2.16	01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 paket	Rp 35.000.000							1 paket	Rp 35.000.000

Sumber : RPJMD Kota Palu 2021-2026

Tabel di atas menggambarkan besaran target dan penganggaran pada Dinas Perhubungan Kota Palu yang akan di capai selama 5 (lima) tahun ke depan. Anggaran di atas merupakan pagu indakatif dari Dinas Perhubungan Kota Palu yang didasari atas kebutuhan kebutuhan dalam rangka mendukung visi dan misi Pemeritah Kota Palu. Seluruh target yang sudah digambarkan di atas akan terlaksana, apabila anggaran yang dibutuhkan dapat dipenuhi.

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**  
**DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALU**

Dalam rangka menindak lanjuti kebijakan yang telah ditetapkan serta yang termuat dalam dokumen RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026, maka perlu disusun indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Palu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Palu 2021-2026 yang diuraikan pada Tabel 7.1 yang menunjukkan pencapaian dari indikator Dinas Perhubungan Kota Palu berdasarkan RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Kunci Dinas Perhubungan Kota Palu yang Mengacu pada RPJMD Kota Palu 2021-2026**

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJM
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah penumpang angkutan darat melalui terminal	81.992	94.701	108.906	130.687	163.359	212.366	212.366
2	Jumlah trayek angkutan umum	6 Trayek	8 Trayek	8 Trayek	10 Trayek	10 Trayek	11 Trayek	11 Trayek
3	Jumlah uji kir angkutan umum	92 unit	97 unit	102 unit	112 unit	122 unit	132 unit	132 unit
4	Persentase layanan angkutan darat	17,99%	19,51%	21,04%	23,14%	25,92%	29,51%	29,51%
5	Persentase Pemenuhan Uji Kendaraan (KIR)	2,19%	2,3%	2,42%	2,66%	2,9%	3,14%	3,14%
6	Pemasangan Rambu-rambu	31,87%	45,48%	59,09%	72,70%	86,32%	99,93%	99,93%
7	Jumlah Revitalisasi Titik Parkir	0	50	100	160	229	279	279
8	Tingkat Pelayanan Ruas Jalan Kota Palu	10	14	17	20	22	25	25
9	Rasio konektivitas kabupaten/kota	0.43	0.58	0.58	0.72	0.72	0.8	0.8

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
10	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	10	14	17	20	22	25	25
11	Indeks Kota Layak Huni	NA	60	62	63	63,5	64	64
12	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan Kota Palu	NA	CC (>50-60)	B (>60-70)	B (>60-70)	B (>60-70)	A (>80-90)	A (>80-90)
13	Nilai SAKIP	B	B (65,50)	B(66,50)	B(67,50)	B(68,50)	B(69,50)	B (65,50)

Sumber : RPMJD Kota Palu 2021-2026

Dari tabel di atas menggambarkan beberapa target yang akan di capai oleh Dinas Perhubungan Kota Palu berdasarkan RPJMD Kota Palu 2021-2026. Target tersebut merupakan indikator yang harus dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Palu guna mendukung Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun Periode 2021-2026.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Palu Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Perhubungan Kota Palu dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan terhadap stakeholder terkait serta masyarakat dalam wilayah Kota Palu. Rencana strategis Dinas Perhubungan Kota Palu merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja (Renja) Dinas perhubungan Kota Palu . Renstra disusun juga dijadikan pedoman dasar dalam evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan selama lima tahun ke depan. Pelaksanaan Renstra Tahun 2021/2026 ini sangat dipelukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Perhubungan Kota Palu karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun guna mencapai visi misi Kota Palu kedepannya.

Semoga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Palu Tahun 2021-2026 ini dapat di implementasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah di tetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan Kota Palu yang mandiri, aman dan nyaman, tagguh, serta profesional dalam konteks pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal dan keagamaan.



**PEMERINTAH KOTA PALU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
JL. GARUDA NO. 10 PALU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALU  
NOMOR 550 / 721 / Dishub / 2021

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA PALU TAHUN 2021-2026

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis pada Dinas Perhubungan Kota Palu, perlu membentuk tim penyusun;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Palu Tahun 2021-2026;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALU TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALU TAHUN 2021-2026.**

**KESATU** : **Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Palu Tahun 2021-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu.**

- KEDUA** : Tim Penyusun Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengkaji dan mengevaluasi Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 termasuk capaian kemajuannya;
  - b. mempelajari visi, misi dan perencanaan yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Palu;
  - c. mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
  - d. mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
  - e. melakukan diskusi untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya demi kesempurnaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
  - f. menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kota Palu.
- KEEMPAT** : Keputusan Dinas Perhubungan Kota Palu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
Pada tanggal Juni 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA PALU,



MOHAMAD ARIF, S.STP., M.SI  
Pembina Utama Muda/ IV/C  
NIP. 197808181996121001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA PALU  
NOMOR 550 / 721 / Dishub / 2021  
TENTANG  
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALU  
TAHUN 2021-2026

- I. Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu  
II. Sekretaris : Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Palu  
III. Anggota : 1. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kota Palu  
2. Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kota Palu  
3. Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kota Palu  
4. Kepala Seksi Perawatan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Palu  
5. Kepala Seksi Pengoprasian Prasarana Dinas Perhubungan Kota Palu  
6. Kepala Seksi Pengujian  
7. Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan Dinas Perhubungan Kota Palu  
8. Kepala Seksi Lalu lintas Dinas Perhubungan Kota Palu  
9. Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan dan program Dinas Perhubungan Kota Palu  
10. Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Palu  
11. Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan Dinas Perhubungan Kota Palu  
12. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Perhubungan Kota Palu  
13. Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Kota Palu  
14. Kepala Seksi Keselamatan Dinas Perhubungan Kota Palu  
15. Kepala UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Palu  
16. Staf Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan Dinas Perhubungan Kota Palu  
17. Staf Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Kota Palu  
18. Staf Seksi Lingkungan Perhubungan Dinas Perhubungan Kota Palu  
19. Staf Sub Bagian Keuangan Perencanaan dan Program Dinas Perhubungan Kota Palu

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA PALU,



MOHAMAD ARIF, S.STP., M.SI  
Pembina Utama Muda / IV/C  
NIP. 197808181996121001